

Katalog: 4102004.91

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA BARAT
2021**



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA BARAT
2021**

ISSN : 2089-1652
No. Publikasi : 91000.2122
Katalog BPS : 4102004.91

Ukuran Buku : 16,5 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xxviii + 101 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit:

www.freepik.com diubah oleh BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh:

©BPS Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh:

CV. Nario Sari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum:

Maritje Pattiwaelapia, SE, M.Si

Penanggungjawab Teknis:

Achmad Ali, SST, M.Ag.b

Penyunting:

Achmad Ali, SST, M.Ag.b

Penulis:

Yeddi Aprian Syakh, SST

Pengolah Data:

Yeddi Aprian Syakh, SST

Gambar Kulit:

Harianto Palanu, S.Stat

KATA

PENGANTAR



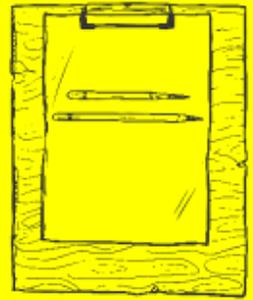
Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini merupakan terbitan kesebelas yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Provinsi Papua Barat. Perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut berbagai aspek yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, perumahan, serta indikator sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Manokwari, November 2021
Kepala BPS Provinsi Papua Barat

Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

DAFTAR ISI



Kata Pengantar



v

Daftar Isi



vii

Daftar Tabel



ix

Daftar Gambar



xi

Tinjauan Umum



xv

Ringkasan Statistik



xix

Penduduk



1

Kesehatan



9

Pendidikan



25

Tenaga Kerja



33

Konsumsi



45

Perumahan



57

Sosial Lain



73

Lampiran



83

DAFTAR TABEL



51

Tabel 1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018 – 2021 (Rupiah)

<https://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR



xvii

Gambar 1. Aspek Pembahasan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

4

Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020

6

Gambar 3. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020

11

Gambar 4. Usia Harapan Hidup Provinsi Papua Barat, 2012-2021

12

Gambar 5. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

14

Gambar 6. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

15

Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Persalinan Kelahiran Terakhir di Papua Barat, 2021

18

Gambar 8. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

21

Gambar 9. Persentase Anak Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama Pemberian ASI dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

DAFTAR GAMBAR



27

Gambar 11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Baca dan Tulis, 2021

29

Gambar 12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

35

Gambar 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2021

37

Gambar 14. Persentase TPT Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, & Pendidikan yg Ditamatkan di Papua Barat, 2021

40

Gambar 15. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Barat, 2021

41

Gambar 16. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kab/Kota dan Sektor Formal/Informal di Papua Barat, 2021

47

Gambar 17. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020

48

Gambar 18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, 2017 – 2020

49

Gambar 19. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020

DAFTAR GAMBAR



52

Gambar 20. Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Menurut Jenis Makanan dan Nonmakanan di Papua Barat, 2021

54

Gambar 21. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020

59

Gambar 22. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

60

Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

61

Gambar 24. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

62

Gambar 25. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

64

Gambar 26. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

66

Gambar 27. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

68

Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Memasak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

70

Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Fasilitas Buang Air Besar dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

DAFTAR GAMBAR



75

Gambar 30. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

75

Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2018

77

Gambar 31. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

78

Gambar 32. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

80

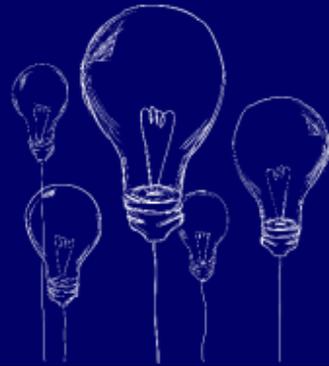
Gambar 33. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

TINJAUAN UMUM



<https://papuabarat.bps.go.id>

Tinjauan UMUM



Gambar 1. Aspek Pembahasan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Papua Barat 2021 menyajikan gambaran perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat tahun 2021. Dimensi kesejahteraan rakyat sangatlah luas dan kompleks. Beberapa aspek pembahasan dalam publikasi ini berupa kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, perumahan, dan aspek sosial lainnya. Sumber data yang digunakan cukup beragam yang utamanya diperoleh melalui hasil sensus maupun survei yang dilakukan BPS. Beberapa data survei yang digunakan yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2021.

Pada aspek kependudukan, akan dibahas terkait populasi penduduk, distribusinya, hingga kepadatan penduduk. Data yang digunakan merupakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2020. Pada aspek kesehatan, pembahasan lebih utama pada pencapaian Usia Harapan Hidup (UHH) maupun data terkait penolong persalinan. Pada aspek pendidikan, lebih ditekankan pada pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pembahasan pada aspek ketenagakerjaan lebih umum pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan lapangan usaha utama bekerja. Sementara pada aspek pengeluaran konsumsi pemerintah difokuskan pada pengeluaran untuk konsumsi makanan dan nonmakanan. Aspek perumahan menjadi salah satu yang cukup banyak dibahas karena terkait kondisi fisik perumahan. Sedangkan pada aspek sosial lainnya akan dibahas mengenai perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tengah marak berkembang.

RINGKASAN STATISTIK



RINGKASAN

STATISTIK 2021



JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK

1.134.068

11-12

Aspek Kependudukan

3,94%

39,45

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

RASIO KETERGANTUNGAN

Info 1. Ringkasan Aspek Kependudukan

1. Penduduk Provinsi Papua Barat hasil Sensus Penduduk 2020 sebesar 1.134.058 jiwa.
2. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama tahun 2010 sampai dengan 2020 sebesar 3,94 persen.
3. Sebaran penduduk Papua Barat tidak merata dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 11-12 Jiwa/km².
4. Setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 39-40 orang penduduk tidak produktif.

RINGKASAN

STATISTIK 2021



USIA HARAPAN HIDUP

% ANGKA KESAKITAN

66,14



20,74

Aspek Kesehatan

82,77



41,09

% BERSALIN TENAGA KESEHATAN

% IMUNISASI LENGKAP

Info 2. Ringkasan Aspek Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup (UHH) Papua Barat pada tahun 2021 adalah 66 hingga 67 tahun.
2. Setidaknya 4 dari 5 persalinan kelahiran terakhir Perempuan Pernah Kawin (PPK) usia 15-49 tahun di Papua Barat dibantu oleh tenaga kesehatan.
3. Sebanyak 11,47 persen penduduk mengeluh mengalami sakit selama sebulan terakhir
4. Hanya 4 dari 10 balita yang pernah mendapat imunisasi lengkap di Provinsi Papua Barat pada tahun 2019.

RINGKASAN

STATISTIK 2021



HARAPAN LAMA SEKOLAH

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH SD

13,13



98,05

Aspek Pendidikan

7,69



94,05

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

ANGKA PARTISIPASI MURNI SD

Info 3. Ringkasan Aspek Pendidikan

1. Harapan Lama Sekolah (HLS) Papua Barat mencapai 13,13 tahun atau setidaknya telah lulus D1 atau D2.
2. Pada kenyataannya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Papua Barat hanya mampu mencapai 7,69 tahun atau setara SMP kelas 1.
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD formal mencapai 98,05 persen, sementara yang sekolah tepat waktu sesuai jenjangnya sebesar 94,05 persen

RINGKASAN

STATISTIK 2021



Info 4. Ringkasan Aspek Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2021 Papua Barat mencapai 70,34 persen.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 Papua Barat mencapai 5,84 persen.
3. Jumlah angkatan kerja Agustus 2021 Papua Barat adalah 513.666 orang.
4. Jumlah pengangguran pada Agustus 2021 Papua Barat sebanyak 29.985 orang.

RINGKASAN

STATISTIK 2021



GARIS KEMISKINAN

% KONSUMSI MAKANAN

631.418



48,24

Aspek Konsumsi

21,84



51,76

% PENDUDUK MISKIN

% KONSUMSI NONMAKANAN

Info 5. Ringkasan Aspek Konsumsi Rumah Tangga

1. Garis kemiskinan Papua Barat tahun 2021 sebesar Rp.631.418,- dan tersebar tidak merata menurut kabupaten/kota.
2. Setidaknya 1 dari 5 orang penduduk Papua Barat pada 2021 terkategori miskin
3. Persentase konsumsi makanan di Papua Barat sebesar 48,24 persen
4. Persentase konsumsi nonmakanan masih mendominasi jenis konsumsi di Papua Barat dengan proporsi sebesar 51,76 persen.

RINGKASAN

STATISTIK 2021



Info 6. Ringkasan Aspek Perumahan

1. 99,51 persen atap terluas rumah tangga di Papua Barat tergolong layak karena terbuat dari bahan non ijuk
2. Dinding terluas rumah tangga di Papua Barat didominasi oleh dinding non bambu, yakni mencapai 99,56 persen.
3. 98,10 persen lantai terluas rumah tangga di Papua Barat merupakan lantai non tanah.
4. Hanya 73,89 persen rumah tangga di Papua Bara yang memiliki akses air minum layak.

RINGKASAN

STATISTIK 2021



% PENERIMA RASKIN

% MENGGUNAKAN PONSEL

33,87

68,11

Aspek Sosial Lain

8,43

54,61

% PENERIMA PIP

% MENGAkses INTERNET

Info 7. Ringkasan Aspek Sosial Lain

1. 5

BAB 1

PENDUDUK



Setiap kebijakan tentang pembangunan selalu bermuara pada kebutuhan penduduk. Penduduk selain menjadi pelaku pembangunan juga bertindak sebagai objek pembangunan itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan yang dilakukan pun akan berdampak pada penduduk itu sendiri. Keberhasilan akan dinikmati secara puas, sementara kegagalan akan menambah penderitaan yang lebih mendalam.

Membahas persoalan kependudukan tentu tidak akan pernah ada habisnya. Setiap hari akan selalu ada saja permasalahan baru yang muncul dari kependudukan ini. Dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran, ada baiknya untuk dapat mampu memahami lebih dalam terkait data kependudukan yang ada sehingga kebijakan lebih terarah dan mendasar.

Gambaran Umum Penduduk



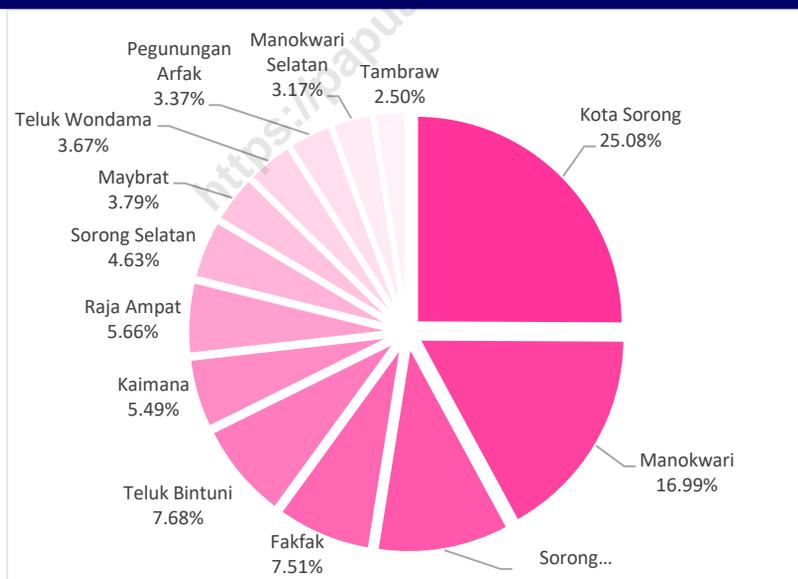
Penduduk Provinsi Papua Barat hasil Sensus Penduduk 2020 mencapai 1.134.068 jiwa, yang terbagi atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 597.128 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 536.940 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk tersebut maka angka rasio jenis kelamin di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 111,21 yang



bermakna bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan di Papua Barat, terdapat 111-112 orang penduduk laki-laki.

Pada umumnya, domisili penduduk Papua Barat terkonsentrasi pada wilayah perkotaan seperti Kota Sorong, Manokwari, dan Kabupaten Sorong. Lebih dari seperempat total penduduk di Papua Barat mendiami Kota Sorong sebesar 284.410 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Tambrauw menjadi wilayah dengan populasi tersedikit dan hanya menyumbang 2,50 persen dari total penduduk Papua Barat. Dari sisi kependudukan, masih terjadi ketidakmerataan persebaran penduduk di Papua Barat.

Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020



Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat dalam Angka 2021

Sebaran penduduk yang tidak merata ini akan berdampak pada ketidakmerataan kepadatan penduduk. Kota Sorong dengan luas wilayah hanya 0,64 persen dari luas Papua Barat dihuni oleh 25,08 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan sebesar 433 penduduk per km². Sebaliknya, Kabupaten Tambrauw dengan luas 11,20 persen dari luas Papua Barat justru hanya dihuni oleh 2,50 persen penduduk Papua Barat dengan kepadatan hanya 2 hingga 3 jiwa per km². Statistik ini menunjukkan perubahan pada wilayah perkotaan yang semakin padat sementara perdesaan semakin berkurang, ini sebagai indikasi terjadinya migrasi dari perdesaan ke perkotaan.

Struktur Penduduk



Menurut Adioutomo (2011), pengaruh struktur penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

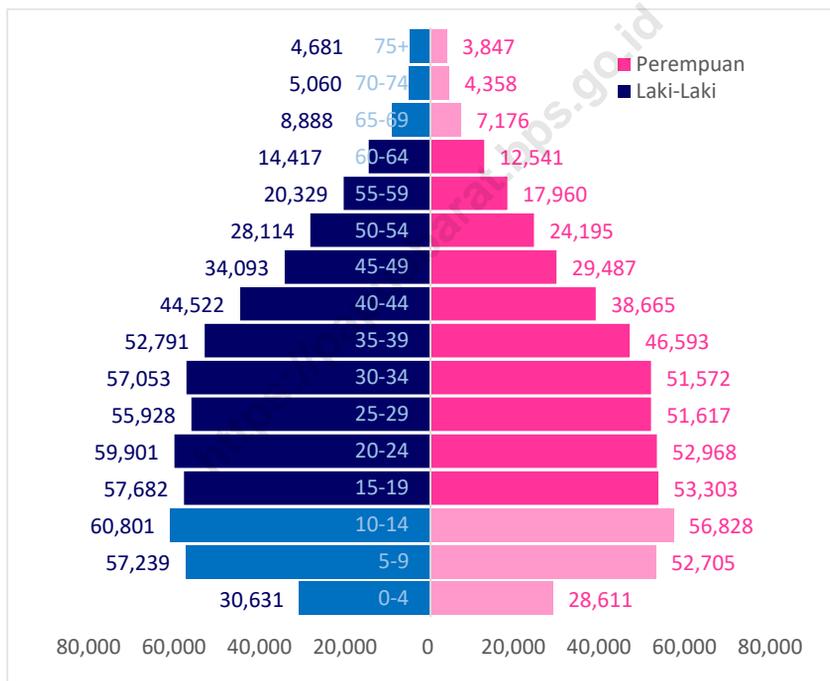
- a. Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita apabila mendapat kesempatan kerja yang produktif;
- b. Peranan perempuan yang juga memasuki pasar kerja, membantu peningkatan pendapatan;
- c. Tabungan masyarakat yang diinvestasikan secara produktif;
- d. Modal manusia yang besar apabila ada investasi untuk itu.

Dampak keberhasilan pengendalian penduduk tercermin dari perubahan struktur umur penduduk yang terlihat dari berkurangnya proporsi penduduk usia tidak produktif khususnya 0—14 tahun. Di sisi



lain, proporsi penduduk usia produktif bertambah. Akibatnya, angka beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif berkurang.

Gambar 3. Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat, 2020



Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat dalam Angka 2021

Piramida penduduk pada gambar 3 menunjukkan bahwa piramida penduduk Papua Barat masih berbentuk ekspansif yang ditandai dengan dominasinya penduduk muda. Penduduk muda yang

banyak dapat menjadi peluang sekaligus tantangan dalam hal pemanfaatan sumber daya yang melimpah ini. Jika dilihat strukturnya lebih dalam, maka dapat dilihat bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) di Papua Barat pada tahun 2020 sebesar 39,92. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Papua Barat harus menanggung 39 hingga 40 orang penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif yang dimaksud adalah penduduk yang berada di kelompok umur 15-64 tahun, sementara penduduk usia tidak produktif adalah mereka yang berada di luar kelompok umur 15-64 tahun, yang terbagi menjadi kelompok belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok tidak produktif lagi (>65 tahun).

Konsekuensi dari tingginya angka ketergantungan (*dependency ratio*) ini adalah bahwa pendapatan yang diperoleh oleh penduduk usia produktif akan terserap sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk usia belum produktif berusia 0-14 tahun, utamanya dalam hal pendidikan dan kesehatan anak-anak.

BAB 2 KESEHATAN



BAB 2

KESEHATAN



M

ulai 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sebelumnya, dalam UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang dinyatakan telah dicabut sejak diterbitkannya Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, sebelum tahun 2013, pemerintah memberikan

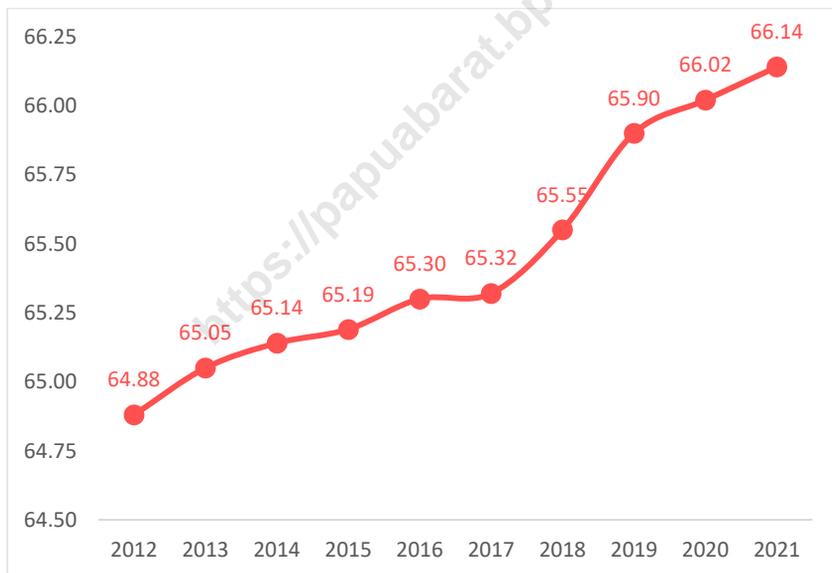
jaminan kesehatan terbatas pada penduduk miskin atau hampir miskin.

Berikut akan dibahas beberapa indikator yang dapat digunakan untuk dapat melihat perkembangan indikator kesehatan di Papua Barat.

Usia Harapan Hidup



Gambar 4. Usia Harapan Hidup Provinsi Papua Barat, 2012-2021

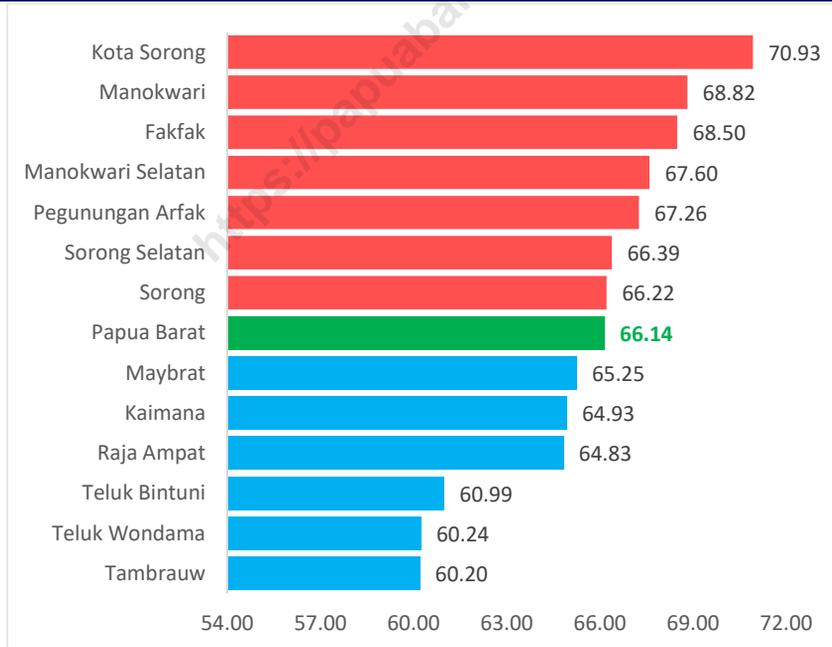


Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2012-2021

Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Papua Barat dalam satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, UHH Papua Barat berada pada level 64,88, sementara pada tahun 2021 telah

meningkat menjadi 66,14. Peningkatan ini meski tidak ekstrim, tapi patut untuk diapresiasi. UHH Papua Barat tahun 2021 sebesar 66,14 bermakna bahwa rata-rata usia seorang bayi yang lahir dapat hidup hingga mencapai 66 hingga 67 tahun dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya kini. Indikator UHH menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan khususnya.

Gambar 5. Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Melihat lebih dalam ke level kabupaten/kota, indikator UHH antar kabupaten/kota di Papua Barat menunjukkan perbedaan harapan hidup yang cukup signifikan. Kota Sorong menjadi wilayah dengan UHH tertinggi dengan capaian sebesar 70,93 tahun, sementara Kabupaten Tambrauw menjadi wilayah dengan capaian UHH terendah, yakni hanya sebesar 60,20 tahun. Kesenjangan antara Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw ini cukup memprihatinkan, mengingat nilai UHH antara keduanya terpaut lebih dari 10 tahun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kabupaten-kabupaten yang masih memiliki UHH yang rendah untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan di daerahnya. Penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas tenaga medis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Sejak tahun 2014, penghitungan UHH mengalami pembaharuan dari metode sebelumnya. Perubahan metode penghitungan UHH terkait dengan perubahan metode proyeksi penduduk yang semula menggunakan metode estimasi (*geometrik*) berubah menjadi metode *component-cohort*. Selain itu, adanya asumsi *Total Fertility Rate* (TFR) nasional sebesar 2,1 di tahun 2025 turut mempengaruhi penghitungan UHH, baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan ini, maka penghitungan indikator UHH tahun sebelumnya juga dilakukan perbaikan.

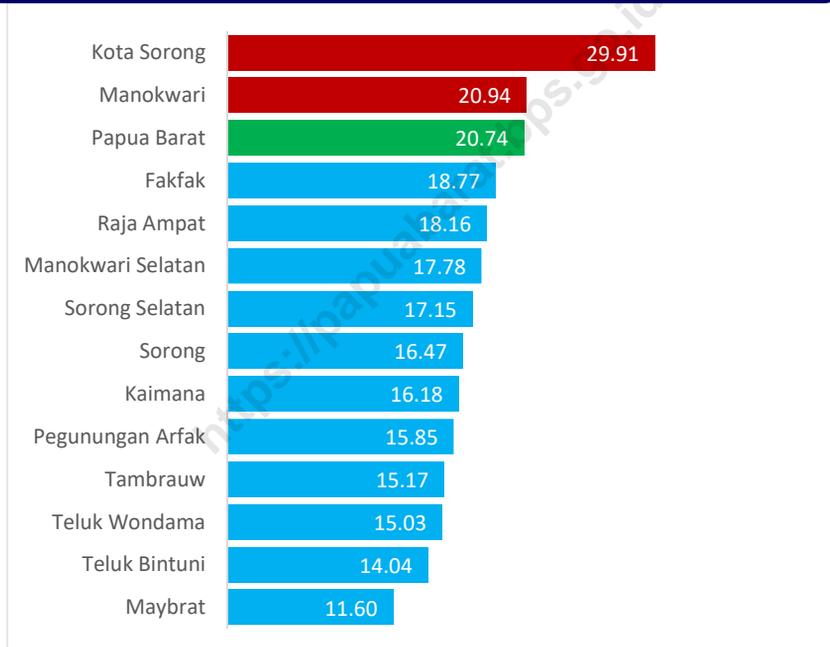
Morbiditas



Indikator lain untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang

mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.

Gambar 6. Persentase Penduduk yang Mengalami Gangguan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya

keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Papua Barat tahun 2021 mencapai 20,74 persen, artinya dari seluruh jumlah penduduk Papua Barat, setidaknya terdapat 1 dari 5 orang penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Semakin tinggi angka ini maka menunjukkan semakin buruknya tingkat kesehatan masyarakat. Tahun 2021, Kabupaten Sorong menjadi kabupaten dengan keluhan kesehatan yang tertinggi di Papua Barat, yakni mencapai 29,91 persen, sementara keluhan kesehatan terendah berada di Kabupaten Maybrat yang hanya sebesar 11,60 persen. Selain disebabkan karena faktor sulitnya akses daerah terpencil, jika diperhatikan lebih dalam, maka pada tahun 2021 ini justru wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar lah yang memiliki kecenderungan mengalami keluhan kesehatan yang jauh lebih tinggi. Hal ini dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut cukup rendah dan perlunya upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, murah, dan merata untuk semua penduduk.

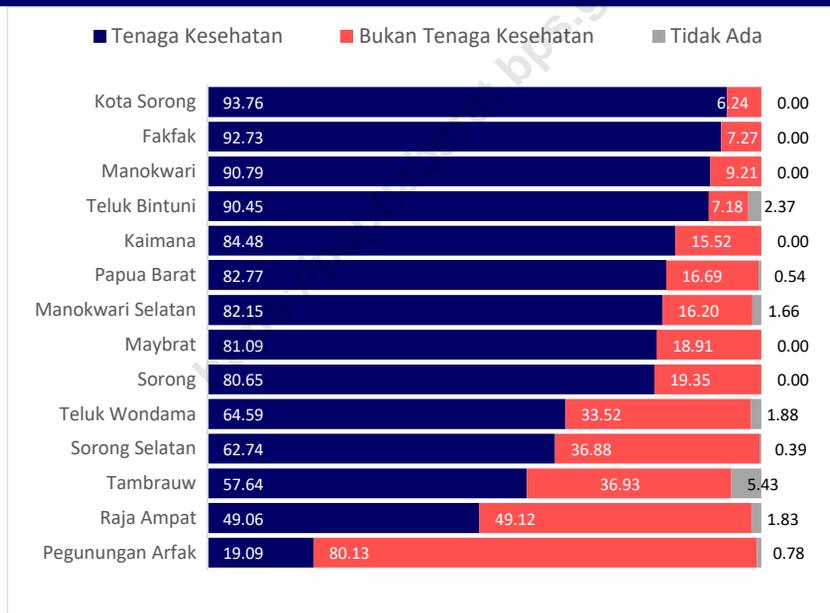
Pertolongan Kelahiran



Penurunan angka kesakitan dan peningkatan umur harapan hidup tidak terlepas dari upaya pencegahan (preventif) dan pengobatan

(kuratif, baik yang dilakukan oleh masing-masing individu maupun yang diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa upaya preventif tersebut antara lain: peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan, peningkatan peran ibu dalam pemberian ASI eksklusif, dan pemberian imunisasi.

Gambar 7. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Persalinan Kelahiran Terakhir di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

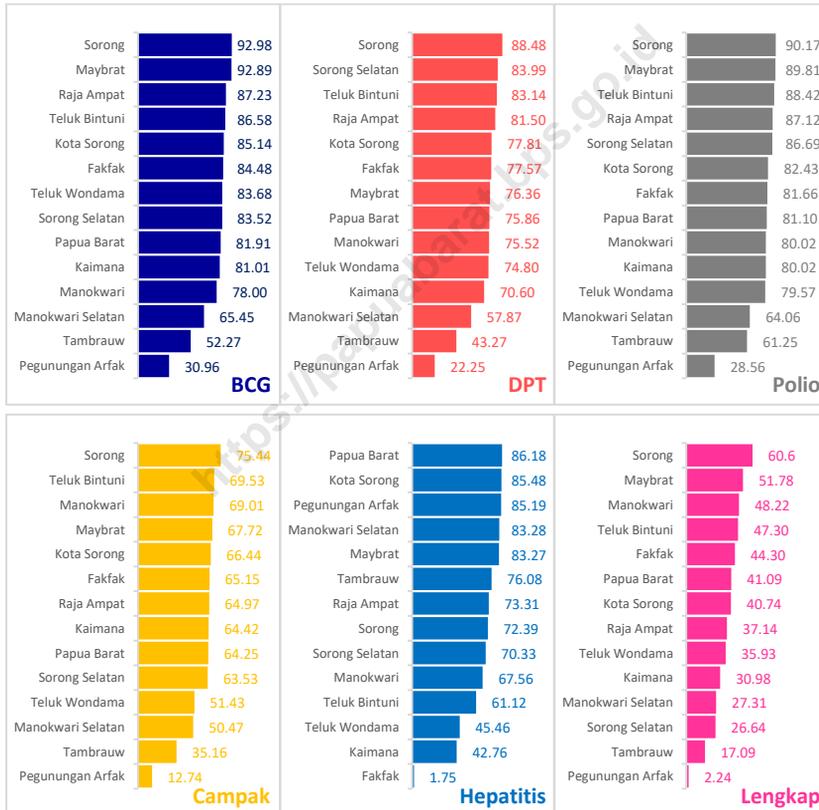
Peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan bertujuan untuk mengurangi kasus kematian bayi. Dengan menurunkan jumlah kasus kematian bayi, diharapkan nantinya dapat meningkatkan umur harapan hidup. Penolong persalinan terakhir di Papua Barat tahun 2021 oleh tenaga kesehatan mencapai 82,77 persen, artinya 4 dari 5 persalinan terakhir dibantu oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud disini mencakup dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Sementara yang termasuk bukan tenaga kesehatan diantaranya dukun beranak/paraji, famili, dan lainnya.

Kota Sorong memiliki persentase tertinggi penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan, yakni mencapai 93,76 persen. Atau dengan kata lain, 9 dari 10 kelahiran terakhir di Kota Sorong ditolong oleh tenaga kesehatan.

Di sisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Papua Barat yang persentase penolong persalinan terakhirnya oleh tenaga kesehatan di bawah 20 persen atau hanya sebesar 19,09 persen saja. Penolong persalinan terakhir di Kabupaten Pegunungan Arfak utamanya dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan, yang persentasenya mencapai hingga 80,13 persen. Tingginya angka persalinan tanpa ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak ini dikarenakan setidaknya dua hal yaitu: *pertama*, masih kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan mencakup seluruh desa; *kedua*, masih adanya budaya melahirkan masyarakat Arfak yang masih tradisional, baik dilakukan sendiri maupun dibantu oleh anggota keluarga saja. Persalinan pun biasanya dilakukan di luar rumah atau di hutan, sehingga memungkinkan risiko yang lebih besar untuk melahirkan anak lahir mati.



Gambar 8. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2019*



*Data Tahun 2020-2021 tidak tersedia

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2019

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan mencegah dari penyakit agar anak sehat. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

Gambar 8 hanya menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak balita menurut jenis imunisasi pada tahun 2019, dikarenakan data tahun 2020-2021 tidak tersedia. Jika dilihat dari cakupan imunisasi lengkap, maka hanya sebanyak 41,09 persen baduta saja yang memperoleh imunisasi lengkap. Hal ini cukup memprihatinkan, mengingat kegunaan imunisasi bagi bayi sangat besar untuk menjaga kesehatannya. Imunisasi lengkap tertinggi berada di Kabupaten Sorong, yang mencapai hingga 60,6 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya mencapai 2,24 persen saja. Tingkat imunisasi lengkap di Kabupaten Pegunungan Arfak ini sangat memprihatinkan, mengingat dari 100 baduta ternyata hanya 2 baduta saja yang mendapatkan imunisasi lengkap. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam hal pemberian imunisasi menurut jenis imunisasi.

Kabupaten Pegunungan Arfak selalu menempati posisi terendah dalam capaian imunisasinya, kecuali untuk cakupan imunisasi hepatitis yang menempati posisi tertinggi kedua, dengan capaian sebesar 85,19 persen.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat meningkatkan target imunisasi di Pegunungan Arfak, mengingat kondisi geografis di kabupaten ini yang sangat sulit untuk dijangkau. Sementara untuk wilayah perkotaan, ada dugaan yang patut diteliti lebih lanjut terkait peningkatan kekhawatiran para ibu yang memiliki bayi untuk memberikan imunisasi pada anaknya akibat pemberitaan negatif tentang dampak negatif pemberian imunisasi pada anak sebagai akibat beredarnya vaksin imunisasi palsu.

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, maka menyusui tanpa memberikan makanan tambahan merupakan cara memberi makan paling ideal bagi bayi pada 4-6 bulan pertama sejak kelahirannya, karena ASI dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi secara seimbang.

Gambar 9 menunjukkan persentase penduduk usia 0-23 bulan di Provinsi Papua Barat yang pernah diberi ASI pada tahun 2021. Secara umum, hanya sebanyak 71,94 persen anak berusia 0-23 bulan di Provinsi Papua Barat yang pernah diberi ASI. Namun jika dipilah menurut wilayah kabupaten/kota, terlihat bahwa persentase anak berusia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI tertinggi justru berada di Kabupaten Pegunungan Arfak, yakni dengan capaian sebesar 98,84 persen, sementara persentase anak berusia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI terendah berada di Kota Sorong. Hal ini cukup menjelaskan dimana wilayah dengan tipikal

perkotaan yang rata-rata ibu rumah tangganya merupakan wanita karir, akan cenderung memberikan ASI kepada anaknya dengan waktu yang jauh lebih pendek, dan lebih memilih untuk memberikan susu formula kepada anaknya ketika mereka harus meninggalkan anak mereka untuk pergi bekerja.

Gambar 9. Persentase Anak Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

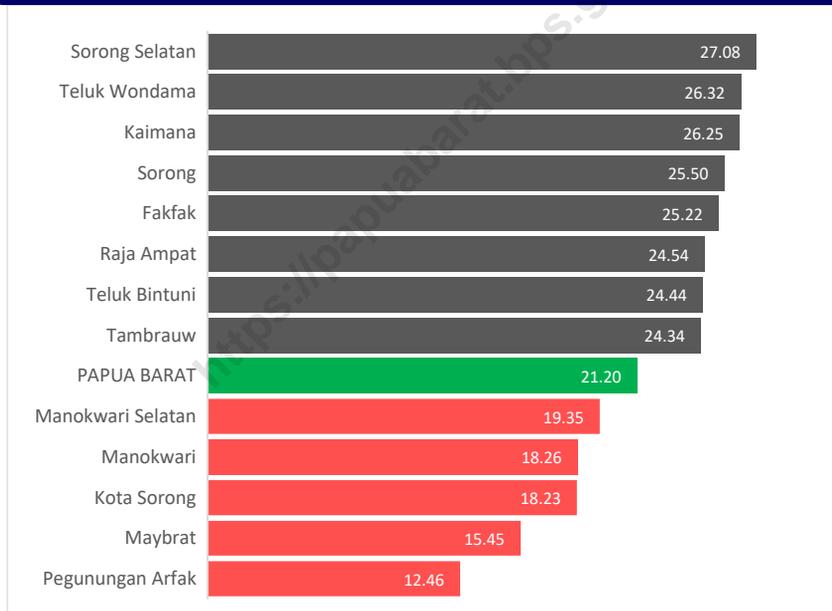
Konsumsi Rokok



Rokok seakan sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Ketergantungan akan rokok seakan mampu menggantikan nasi untuk konsumsi makanan seperti pepatah Jawa “*Mangan ora mangan sing penting kumpul*”. Biasanya kegiatan *ngumpul/nongkrong* pun tak lepas dengan hadirnya si rokok. Padahal telah jelas peringatan

yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan akan bahaya rokok. Rokok bukan hanya berbahaya bagi si perokok aktif saja, melainkan juga bagi orang di sekitarnya (perokok pasif) yang menghirup asap rokok tersebut. Ancaman yang ditampilkan pada bungkus rokok pun seakan tak memberikan efek jera bagi para “pecandu rokok”.

Gambar 10. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Merokok Selama Sebulan Terakhir di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Sebanyak lebih dari 20 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Papua Barat merupakan perokok, dimana 17,89 persen di antaranya merupakan perokok aktif yang merokok setiap hari, dengan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per minggunya mencapai lebih dari 60 batang per minggu, atau 8 hingga 9 batang rokok per harinya.

Jika dipilah menurut kabupaten/kota, maka persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang merokok di Kabupaten Sorong Selatan adalah yang terbanyak di Provinsi Papua Barat, yakni mencapai 27,08 persen. Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang merokok paling sedikit berada di Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya sebanyak 12,46 persen saja.

Merokok bukanlah budaya dan bukan pula kebiasaan yang baik, meski setiap orang berhak untuk memilih apa yang disukainya. Karena hal ini akan berdampak pada keutuhan kehidupan bermasyarakat secara umum. Hal ini masih menjadi polemik yang tidak berujung, di satu sisi pemerintah menerima pajak cukai rokok yang cukup besar bagi APBN, sementara di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan masyarakatnya dari penyakit yang disebabkan oleh rokok melalui Kementerian Kesehatan. Tentu perlunya edukasi yang baik dan menyeluruh dari pemerintah kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi rokok, terlebih jika hal tersebut dilakukan di tempat umum. Bagi perokok aktif pun harus tahu dan sadar diri bahwa tidak semua orang menyukai menghirup asap rokok, sehingga mampu memahami kondisi orang lain bukan malah mengesampingkannya demi kesenangan dan kepuasan pribadi.

BAB 3

PENDIDIKAN



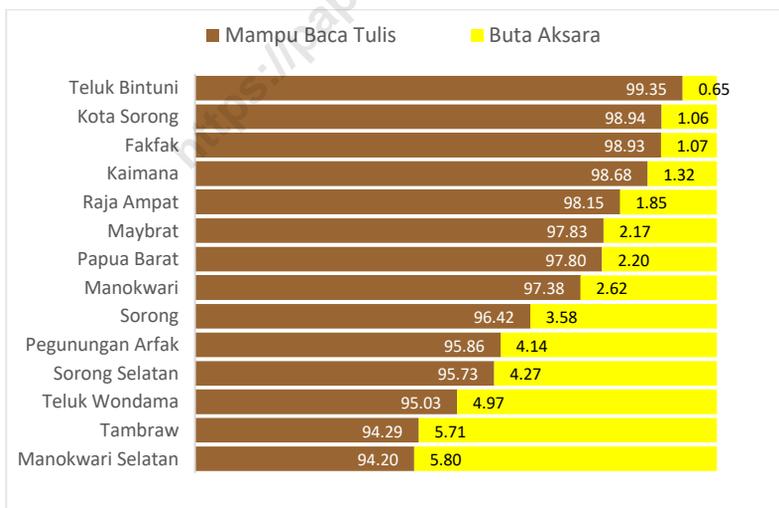
Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun ketiga, yaitu periode tahun 2017—2022. Target dan sasaran Visi pembangunan pada periode tahun ketiga ini ditekankan pada menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Salah satu upaya menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat tersebut diantaranya dilakukan melalui Misi ketiga, yakni meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ada tiga agenda penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan pada tahun 2021. *Pertama*, mengejar kenaikan angka melek huruf hingga mencapai 97 persen, dengan target khusus capaian angka melek huruf untuk orang asli papua (OAP) juga mencapai 97 persen. *Kedua*, menargetkan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 8,5 tahun (penduduk usia sekolah bersekolah pada jenjang pendidikan kelas dua atau kelas tiga SMP), dengan target khusus capaian rata-rata lama sekolah untuk orang asli papua (OAP) mencapai 5,5 tahun (penduduk usia sekolah bersekolah pada jenjang pendidikan kelas lima atau enam SD). *Ketiga*, menargetkan capaian harapan lama sekolah sebesar 12,75 tahun (bersekolah hingga jenjang kelas 3 SMA), dengan target khusus capaian rata-rata lama sekolah untuk orang asli papua (OAP) mencapai 10,60 tahun (bersekolah hingga jenjang kelas 1 atau kelas 2 SMA).

Sehingga pembahasan pada Bab 3 ini difokuskan pada capaian kinerja pembangunan Provinsi Papua Barat di bidang pendidikan, terutama pada indikator-indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah dimana ketiga indikator ini menjadi target capaian kinerja pembangunan bidang pendidikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2017-2022.

Pencapaian pendidikan harus didasarkan pada kemampuan baca dan tulis setiap warga. Penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Barat yang dapat baca tulis mencapai 97,80 persen, sementara hanya sebesar 2,20 persen yang tergolong buta aksara.

Gambar 11. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kemampuan Baca dan Tulis, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Buta aksara tertinggi terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mencapai 5,80 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Teluk Bintuni yang hanya sebesar 0,65 persen.

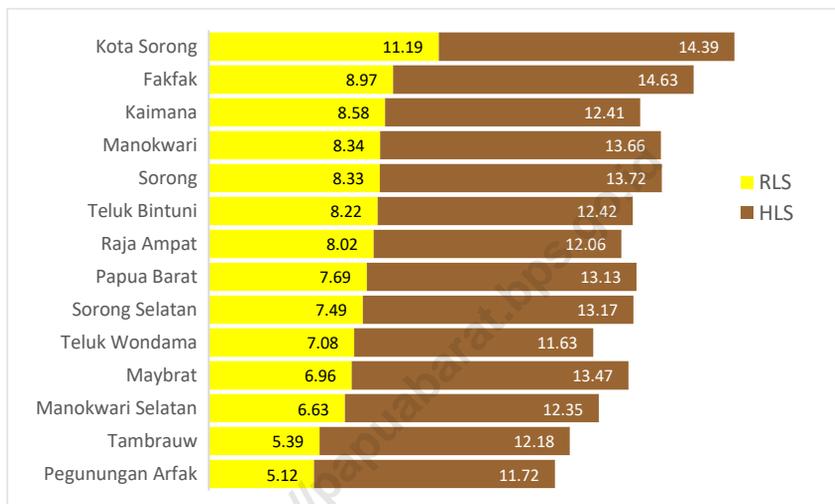
Harapan dan Rata Lama Sekolah



Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan dua indikator yang dijadikan sebagai komponen untuk mengukur pembangunan manusia metode baru dari aspek pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sementara rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk bersekolah.



Gambar 12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2021

Kesenjangan antara harapan lama sekolah dan realisasi rata-rata lama sekolah masih cukup senjang ditunjukkan pada gambar 12. Harapan lama sekolah Papua Barat berada pada 13,13 tahun atau setidaknya diharapkan akan dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Namun sayangnya, rata-rata lama sekolah Papua Barat masih berada di angka 7,69 tahun atau jenjang kelas 1 atau kelas 2 SMP. Idealnya, harapan lama sekolah itu tidak berselisih jauh dengan rata-rata lama sekolah.

HLS dan RLS di tingkat kabupaten/kota sangat bervariasi. Terlihat bahwa dari semua kabupaten/kota, jarak antara HLS dan RLS di Kota Sorong lah yang paling kecil. Sebaliknya, kesenjangan HLS dan RLS

terbesar terjadi di Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan antar kabupaten/kota di Papua Barat masih sangat timpang. Harapan lama sekolah di Kota Sorong mencapai 14,39 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang pendidikan D2 atau D3, sementara realitanya menunjukkan rata-rata lama sekolah tahun 2021 masih di angka 11,19 tahun atau jenjang kelas 2 SMA. Kesenjangan tertinggi di Kabupaten Pegunungan Arfak juga sangat mengkhawatirkan. HLS tahun 2021 Kabupaten Pegunungan Arfak mencapai 11,72 tahun atau diharapkan dapat bersekolah hingga jenjang pendidikan kelas 2 SMA, namun realitanya rata-rata lama sekolah Kabupaten Pegunungan Arfak justru hanya mampu mencapai angka 5,12 tahun atau berada pada jenjang kelas 5 atau 6 SD.

BAB 4

TENAGA KERJA



Pengamatan kondisi ketenagakerjaan dari waktu ke waktu penting dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Bab 4 ini menyajikan beberapa indikator kunci ketenagakerjaan mulai dari struktur penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan.

Penduduk Usia Kerja

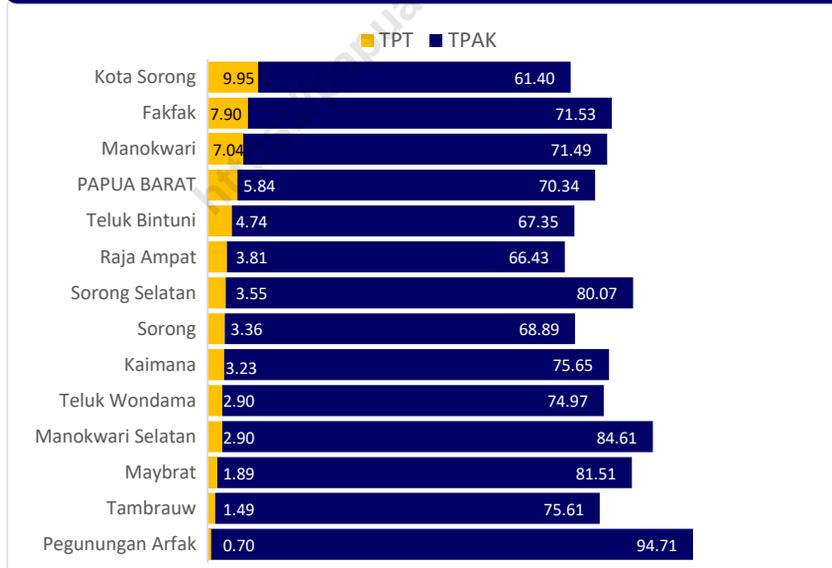


Estimasi jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021 mencapai 730.251 jiwa. Lebih dari 70 persen diantaranya termasuk angkatan kerja (yakni sebesar 70,34 persen), angka ini meningkat sebesar 0,79 poin dibanding Agustus 2020 yang mencapai 69,55 persen. Jumlah penduduk usia kerja laki-laki tahun 2021 sebanyak 388.186 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia kerja perempuan sebanyak 342.055 jiwa. Sementara jika dilihat berdasarkan kategori wilayah, maka jumlah penduduk usia kerja di perdesaan jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Jumlah penduduk usia kerja di perdesaan sebanyak 411.433 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia kerja di perkotaan sebanyak 318.818 jiwa.



Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan TPAK tahun 2020. Dengan demikian, diindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja sedikit bertambah banyak.

Gambar 13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota, 2021



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2021

Jika dibandingkan antara perkotaan dan perdesaan, TPAK perdesaan jauh lebih besar dibandingkan TPAK perkotaan, yakni 75,26 persen berbanding 63,99 persen. Salah satu penyebabnya adalah akses pendidikan di perdesaan lebih sulit daripada di perkotaan. Akibatnya, penduduk usia sekolah di perdesaan lebih banyak tergolong sebagai penduduk angkatan kerja. Sebaliknya, di perkotaan banyak yang termasuk bukan angkatan kerja. Selain itu, banyak angkatan kerja di perdesaan tergolong sebagai pekerja meskipun dengan status pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur. Mereka yang tergolong pengangguran yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari kerja atau mempersiapkan suatu usaha, dan mereka yang sementara belum mulai kerja walau sudah mendapat pekerjaan dan mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak angkatan kerja yang berstatus pengangguran, maka semakin tinggi TPT.

TPT di Provinsi Papua Barat untuk kondisi Agustus 2021 sebesar 5,84 persen, lebih rendah dibandingkan dengan TPT tahun 2020 yang mencapai 6,18 persen. Tingkat pengangguran di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding di perdesaan. TPT perkotaan mencapai 9,07 persen, sedangkan TPT perdesaan mencapai 3,71 persen.

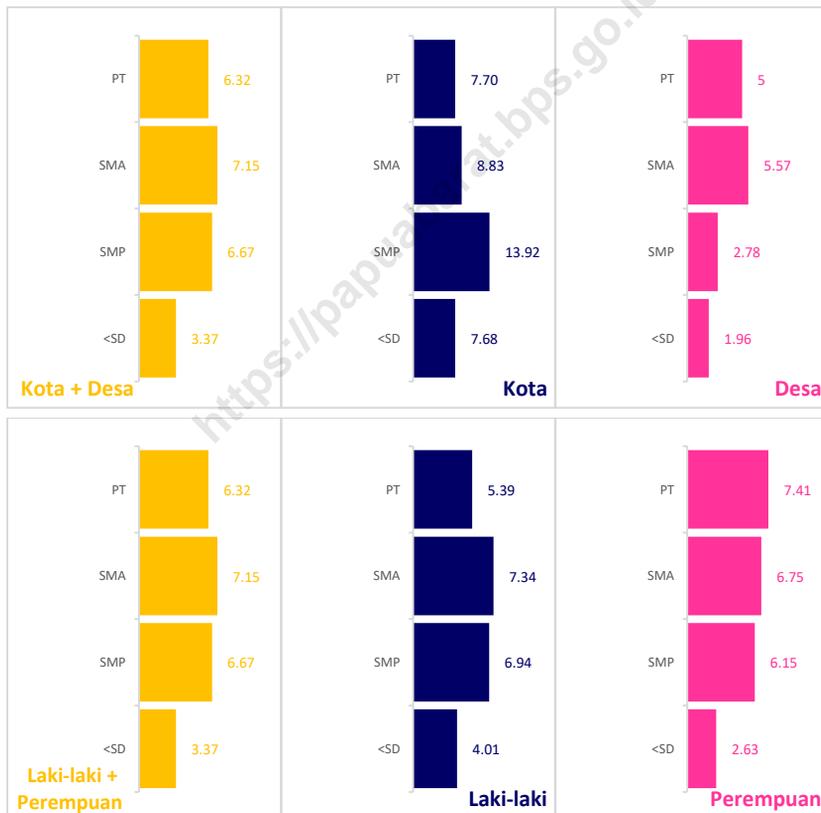
Menurut kabupaten/kota, TPAK tertinggi tahun 2021 terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak yakni mencapai 94,71 persen. Sementara TPAK terendah terdapat di Kota Sorong, yakni mencapai 61,40 persen. Namun jika dilihat menurut TPT, Kota Sorong menjadi yang tertinggi yakni mencapai 9,95 persen, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak

menjadi yang terendah yakni hanya mencapai 0,70 persen.

Pendidikan Tenaga Kerja



Gambar 14. Persentase TPT Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, & Pendidikan yg Ditamatkan di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2021

Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan angkatan kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar TPT-nya. Gambar 14 menunjukkan bahwa TPT dari angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah lebih rendah daripada TPT dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan minimal Sekolah Menengah (SM). Puncak TPT tertinggi pada kelompok pendidikan Sekolah Menengah (Baik setingkat SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat). Pada tahun sebelumnya, puncak TPT juga berada pada kelompok angkatan kerja berpendidikan sekolah menengah. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah jauh lebih mudah terserap dalam lapangan pekerjaan daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Lebih ekstrim lagi jika TPT per tingkat pendidikan dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Semakin jelas bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap angkatan kerja di perkotaan tidak sekuat di perdesaan.

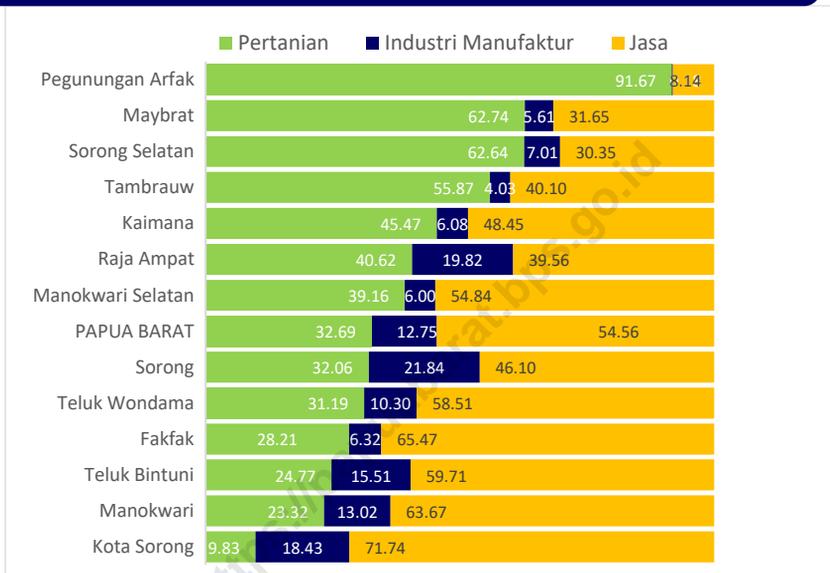
Jika dibagi menurut wilayah perkotaan maupun perdesaan, terlihat bahwa TPT tertinggi tahun 2021 di perkotaan terjadi pada lulusan SMP, yakni mencapai 13,92 persen, sedangkan di perdesaan, justru TPT tertinggi terjadi pada lulusan SMA, yakni mencapai 5,57 persen. Penyerapan tenaga kerja di perdesaan jauh lebih baik dibanding perkotaan. Namun jika dilihat menurut jenis kelamin, TPT tertinggi tahun 2021 pada laki-laki terjadi pada lulusan SMA, yakni mencapai 7,34 persen. Sedangkan pada perempuan, justru TPT tertinggi terjadi pada lulusan Perguruan Tinggi, yakni mencapai 7,41 persen.

Gambaran ketenagakerjaan berdasarkan sektor/lapangan usaha dari tahun ke tahun menjelaskan terjadinya pergeseran struktur lapangan pekerjaan di Papua Barat, dimana sektor pertanian semakin menurun karena semakin ditinggalkan angkatan kerja yang lebih memilih sektor industri (*manufacture*) dan jasa-jasa (*services*). Persentase angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor terakhir semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ciri-ciri urbanisasi umumnya terjadi ketika sektor industri dan jasa semakin diminati para pencari kerja. Selama pertanian terus menjadi sektor yang subsisten dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor lain maka pertanian akan semakin ditinggalkan. Mereka yang memasuki sektor pertanian adalah mereka yang tidak punya kesempatan masuk ke sektor industri dan jasa-jasa dan kalah bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkualitas.

Sampai dengan tahun 2014, sektor pertanian masih menjadi primadona penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Perkembangan serapan tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun, dan sebaliknya perkembangan serapan tenaga kerja di sektor jasa-jasa justru semakin meningkat. Dan akhirnya pada tahun 2015, proporsi tenaga kerja yang terserap di sektor jasa-jasa telah melampaui serapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor jasa-jasa tidak dapat dipisahkan dari peningkatan capaian pendidikan di Provinsi Papua Barat yang ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,15 tahun pada tahun 2017 menjadi 7,69 tahun pada tahun 2021.

Gambar 15. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Barat, 2021



Catatan:

- Manufaktur : Pertambangan; industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi
- Jasa : Perdagangan; transportasi; keuangan; dan jasa kemasyarakatan

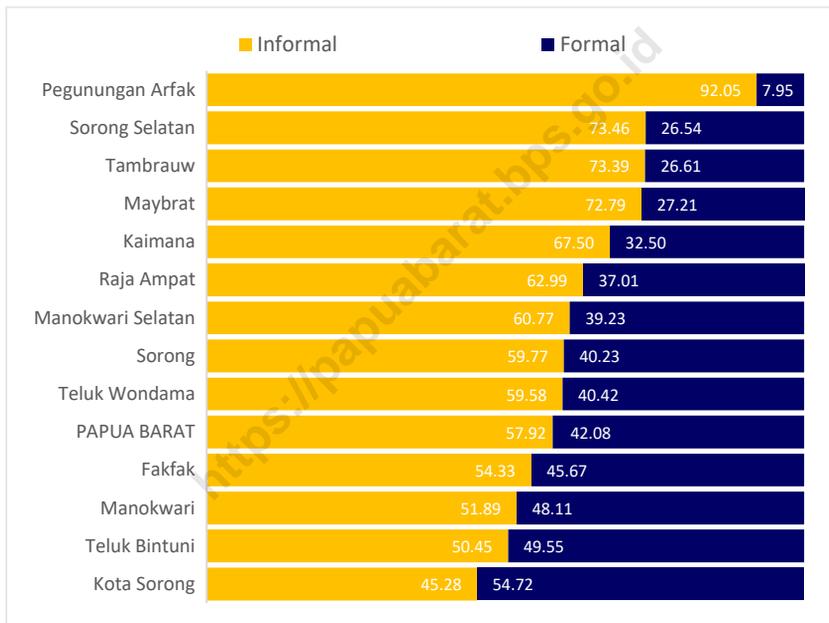
Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2021

Tahun 2021 menunjukkan komposisi penduduk yang bekerja di sektor jasa telah mencapai lebih dari 50 persen. Terdapat 6 dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat yang penduduk bekerjanya didominasi oleh sektor jasa-jasa, yaitu Kota Sorong, Manokwari, Fakfak, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan. Di sisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak masih didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian yang persentasenya mencapai 91,67 persen.

Status Pekerjaan



Gambar 16. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kab/Kota dan Sektor Formal/Informal di Papua Barat, 2021



Catatan:

- Formal : Penduduk yang bekerja dengan status sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai
- Informal : Penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar atau pekerja keluarga, pekerja bebas, atau pekerja keluarga

Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Papua Barat Agustus 2021

Secara umum terlihat bahwa pekerja di sebagian besar kabupaten/kota di Papua Barat lebih dominan bekerja di sektor informal. Persentase pekerja di sektor informal pada tahun 2021 mencapai 57,92 persen, sementara pekerja formal mencapai 42,08 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, proporsi pekerja informal pada tahun 2021 terbesar di Kabupaten Pegunungan Arfak yang mencapai 92,05 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Kota Sorong yang hanya mencapai 45,28 persen. Rendahnya pekerja informal di Kota Sorong sangat dimungkinkan karena penduduk Kota Sorong lebih tertarik untuk menjadi pegawai/buruh yang memiliki penghasilan tetap dibandingkan harus berusaha sendiri. Rendahnya minat ini tentu menjadi tantangan pemerintah daerah dalam hal mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih mengedepankan kreativitas dari lulusan-lulusan pendidikan di perkotaan.

BAB 5 KONSUMSI



BAB V

KONSUMSI



Agenda sasaran pokok RPJPD tahun 2017-2022 Provinsi Papua Barat adalah penanggulangan kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Penurunan persentase penduduk miskin dapat dimaknai dengan meningkatnya pendapatan penduduk dan sekaligus meningkatnya tingkat kesejahteraannya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah peningkatan tingkat pendapatan tersebut telah dinikmati oleh semua penduduk secara merata atau hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja. Pembahasan bab 5 ini mengulas jawaban permasalahan tersebut dengan mengkaji bagaimana taraf dan pola konsumsi sebagai proksi dari taraf dan pola pendapatan penduduk Papua Barat.

Kemiskinan

Mollie Orshansky, seorang ekonom dan ahli statistik Amerika pada tahun 1963—1965 mengembangkan Garis Kemiskinan Orshansky. Beliau menyatakan, *“Unlike some other calculations, those relating to poverty have no intrinsic value of their own. They exist only in order to help us make them disappear from the scene.... with imagination, faith and hope, we might succeed in wiping out the scourge of poverty even if we don't agree on how to measure it.”*

BPS menggunakan pendekatan kemampuan penduduk dalam

memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk menghitung kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Papua Barat pada Maret 2021 sebesar Rp. 631.418,- Pada tahun 2020 yang lalu, garis kemiskinan tertinggi berada di Kota Sorong dimana Garis Kemiskinan (GK) mencapai Rp. 765.183,- sementara Garis Kemiskinan (GK) terkecil berada di Kabupaten Sorong Selatan dimana Garis Kemiskinan (GK) mencapai Rp. 347.898,-

Gambar 17. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020*



Catatan: *Data tahun 2021 belum tersedia

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2020

Gambar 18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat, 2017 – 2020*



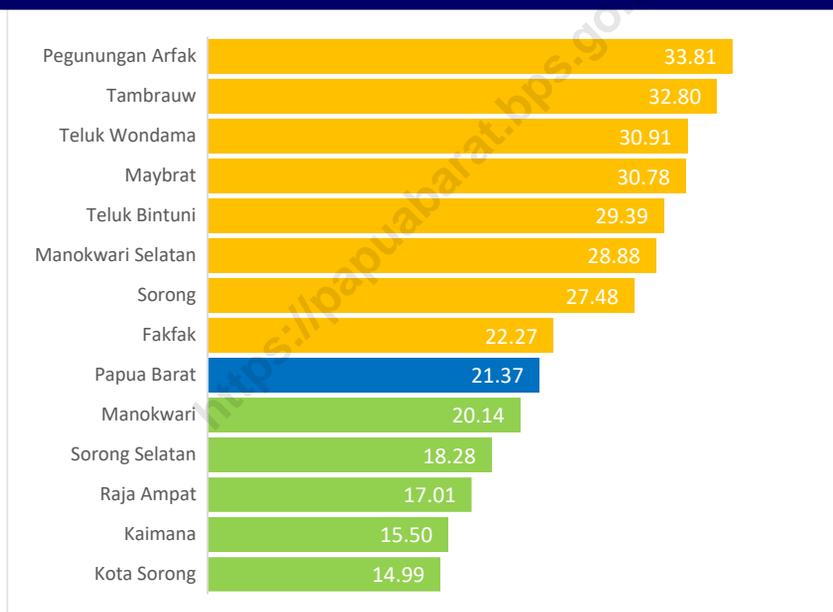
Catatan: *Data tahun 2021 belum tersedia

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2017-2020

Dengan kondisi GK tahun 2020 sebesar Rp. 610.888,- maka persentase penduduk miskin Provinsi Papua Barat tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 21,37 persen. Persentase ini terus mengalami penurunan sepanjang empat tahun terakhir. Tidak hanya secara persentase mengalami penurunan, namun secara nominal, jumlah penduduk miskin Papua Barat juga terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Papua Barat mencapai 208,58 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 1,38 persen dibanding

tahun 2019. Penurunan persentase kemiskinan ini cukup diapresiasi meski masih meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2020, 1 dari 4 orang penduduk Papua Barat tergolong miskin.

Gambar 19. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020*



Catatan: *Data tahun 2021 belum tersedia

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2020

Masalah lain dari penanggulangan kemiskinan di Papua Barat adalah perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota yang masih terlalu besar. Gambar 19 memberikan gambaran persentase

penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Papua Barat tahun 2020.

Tiga kabupaten dengan level kemiskinan tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Pegunungan Arfak, Tambrauw, dan Teluk Wondama dengan persentase masing-masing sebesar 33,81 persen; 32,80 persen; dan 30,91 persen. Di sisi lain, terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah 20 persen, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, dan Kota Sorong dengan persentase masing-masing sebesar 18,28 persen; 17,01 persen; 15,50 persen; dan 14,99 persen. Secara seksama, dapat terlihat bahwa mayoritas kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi didominasi oleh kabupaten pemekaran. Kabupaten-kabupaten pemekaran ini sudah tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah pusat dalam hal pemerataan tingkat kesejahteraan di Papua Barat. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus fokus pada pemerataan bagi seluruh penduduknya.

Konsumsi Rumah Tangga



Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan peningkatan pendapatan penduduk sehingga mampu melewati batas garis kemiskinan. Tingkat pendapatan penduduk didekati dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Selama tahun 2010—2021, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk di Provinsi Papua Barat meningkat dari Rp. 601.279 pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.030.232 pada tahun 2015 dan sedikit mengalami penurunan menjadi Rp. 1.009.401



pada tahun 2016, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 yang telah mencapai Rp. 1.447.481,- Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita ini mengindikasikan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 1. Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018 – 2021 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	1 128 329	1 332 250	1 457 757	1 487 155
Kaimana	1 214 131	1 093 087	1 341 032	1 254 536
Teluk Wondama	1 127 630	1 358 389	1 601 286	1 239 119
Teluk Bintuni	1 527 643	1 478 021	1 576 608	1 539 003
Manokwari	1 243 641	1 573 407	1 550 071	1 432 918
Sorong Selatan	976 125	1 075 384	1 031 556	927 568
Sorong	1 107 168	1 343 330	1 317 101	1 451 707
Raja Ampat	1 109 535	1 211 347	1 231 861	1 127 277
Tambrauw	524 510	526 347	727 617	1 027 581
Maybrat	1 160 478	1 187 456	1 233 881	1 553 699
Manokwari Selatan	1 006 707	1 205 390	1 307 415	1 209 578
Pegunungan Arfak	602 799	478 052	575 425	779 101
Kota Sorong	1 245 517	1 570 003	1 504 435	1 759 572
Papua Barat	1 128 329	1 368 510	1 395 014	1 447 481

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018-2021

Pengeluaran per kapita per bulan tahun 2021 menurut kabupaten/kota menunjukkan kesenjangan yang nyata antar kabupaten/kota. Pengeluaran per kapita per bulan tertinggi adalah Kota Sorong yang mencapai Rp. 1.759.572,- sementara yang terendah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan hanya senilai Rp. 779.101,-.

Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten dengan pengeluaran perkapita terendah disebabkan oleh ketiadaan fasilitas jual beli dan kegiatan ekonomi yang tersebar di seluruh desa yang ada. Sehingga konsumsinya pun akan lebih homogen dibandingkan dengan wilayah lain.

Distribusi Pendapatan

Gambar 20 memperlihatkan pengeluaran per kapita per bulan menurut golongan pengeluaran di Papua Barat tahun 2021. Tampak bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi pada komoditas nonmakanan yaitu sebesar 51,76 persen, sedangkan pengeluaran untuk makanan sebesar 48,24 persen.

Gambar 20. Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Menurut Jenis Makanan dan Nonmakanan di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2021

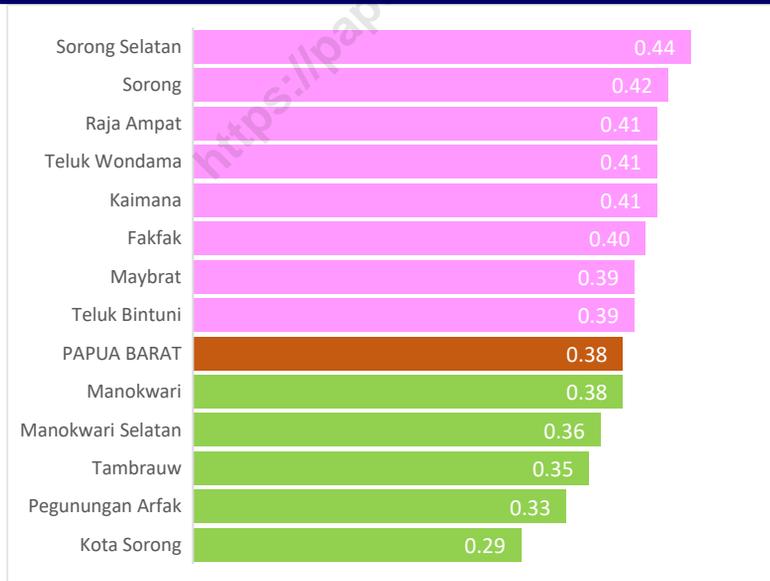
Persentase pengeluaran per kapita menurut jenis makanan didominasi oleh pembelian makanan dan minuman jadi dengan porsi sebesar 21,17 persen. Penduduk Papua Barat kini mulai beralih pada konsumsi makanan yang instan. Hal ini memberikan indikasi semakin konsumtifnya penduduk Papua Barat. Hal berikutnya yang juga menarik adalah konsumsi tembakau dan sirih menjadi yang kedua terbesar porsinya untuk komoditas makanan. Persentase konsumsi tembakau dan sirih ini mencapai 14,21 persen dan menjadi yang terbesar kedua. Konsumsi jenis ini termasuk di dalamnya jenis rokok. Dapat dikatakan bahwa konsumsi rokok bahkan melebihi konsumsi atas padi-padian yang merupakan bahan makanan paling pokok di Indonesia. Dari sisi nonmakanan, pengeluaran yang paling dominan adalah perumahan dengan porsi sebesar 57,60 persen dari total pengeluaran nonmakanan.

Idealnya, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Ukuran tingkat pemerataan digunakan untuk mengukur seberapa adil “kue pembangunan” dinikmati oleh semua penduduk.

Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan adalah koefisien Gini dan tingkat pemerataan menurut Bank Dunia. Koefisien Gini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk, dimana nilai koefisien gini nol, bermakna pemerataan terjadi sempurna, dan nilai koefisien gini satu, bermakna ketimpangan sangat parah.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yakni: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Apabila persentasenya kurang dari 12 persen maka termasuk dalam kategori ketimpangan tinggi; antara 12—17 persen kategori ketimpangan sedang; dan lebih dari 17 persen kategori ketimpangan rendah.

Gambar 21. Rasio Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2020

Rasio gini Papua Barat tahun 2020 berada pada level 0,380 dan masuk dalam kategori sedang. Kabupaten dengan kesenjangan tertinggi menurut indeks rasio gini di Papua Barat tahun 2020 adalah Kabupaten Sorong Selatan, yakni sebesar 0,44, sedangkan kabupaten dengan kesenjangan terendah adalah Kota Sorong, yakni sebesar 0,29.

<https://papuabarat.bps.go.id>

BAB 6 PERUMAHAN



BAB VI

PERUMAHAN



Hak warga negara untuk bertempat tinggal telah diatur baik dalam UUD 1945 maupun undang—undang. UUD 1945 Pasal 28H menyatakan, *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Bab III Perumahan, Pasal 5 selanjutnya menegaskan bahwa, *“Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur.”* Dengan demikian, hak bertempat tinggal bagi warga negara sesungguhnya telah dinaungi payung hukum yang paling tinggi.

Idealnya, negara wajib memenuhi hak warga negaranya untuk menempati, menikmati, atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat aman, serasi dan teratur. Namun, karena kecepatan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi belum dapat diimbangi oleh kemampuan penyediaan perumahan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka belum semua penduduk memiliki rumah sendiri.

Gambar 22. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



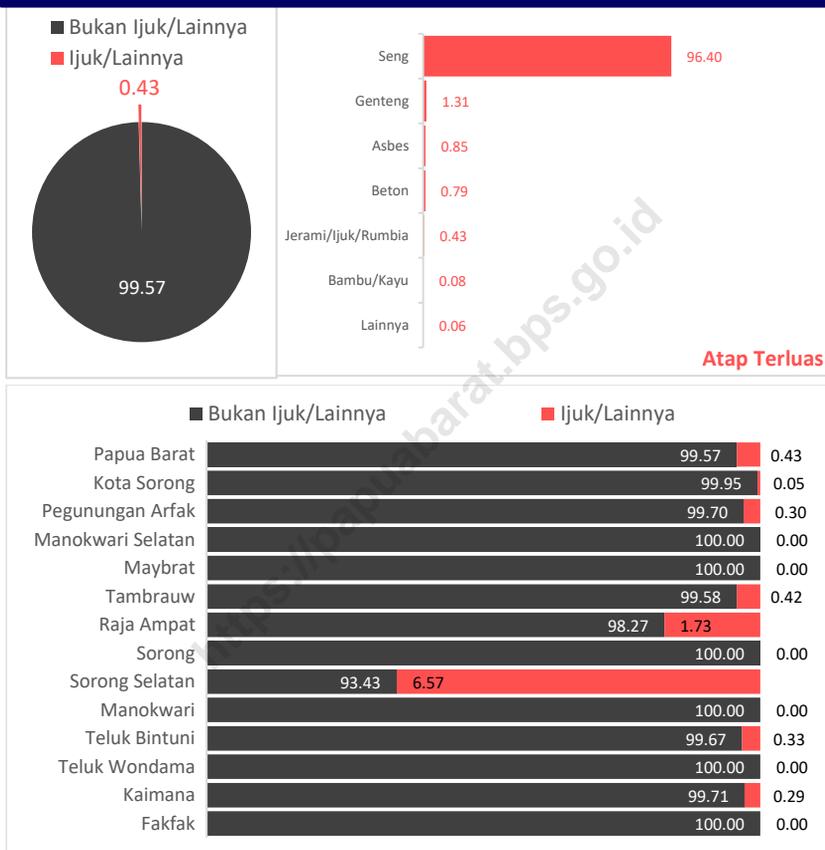
Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Data Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga tinggal di rumah milik sendiri yakni sebanyak 76,13 persen. Rumah tangga yang memilih untuk mengontrak/sewa sebanyak 11,19 persen, disusul rumah bebas sewa sebesar 9,91 persen, dan yang tinggal di rumah dinas/lainnya sebanyak 2,87 persen.

Rumah Layak Huni

Berdasarkan kategori perumahan layak huni yang digunakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, dapat dilihat melalui kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. Untuk kategori atap dibagi atas bukan ijuk/lainnya dan ijuk/lainnya, kategori dinding dibagi atas bukan bambu/lainnya dan bambu/lainnya, dan kategori lantai dibagi atas bukan tanah dan tanah.

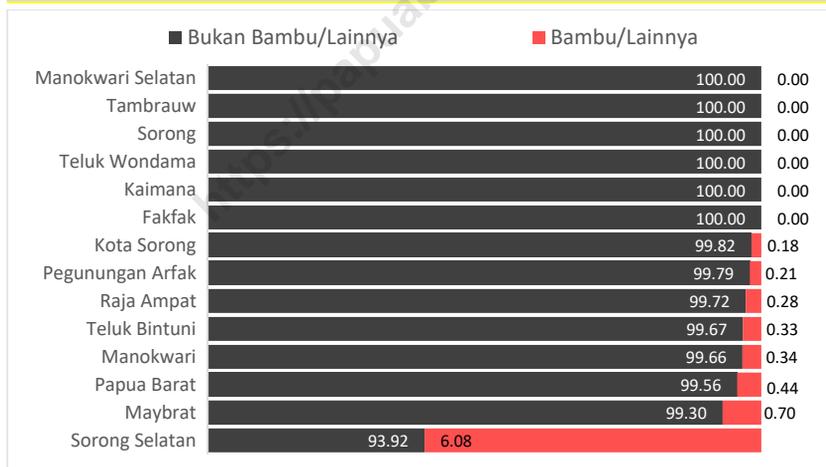
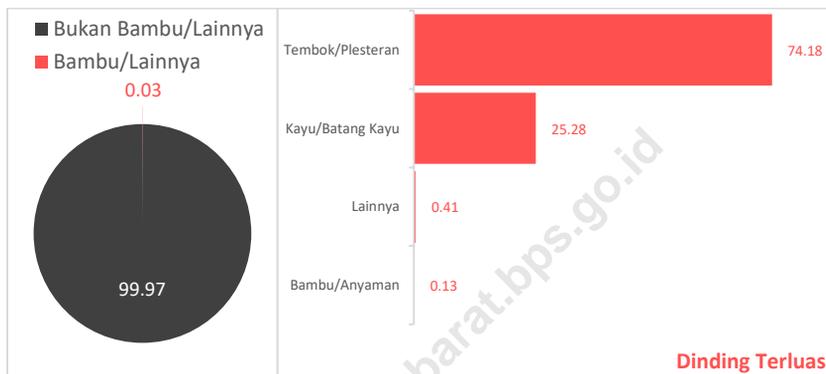
Gambar 23. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Menurut jenis atap terluas, sebanyak 99,57 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki rumah dengan atap bukan ijuk dan didominasi oleh seng dengan 96,40 persen. Di setiap kabupaten/kota, jenis atap bukan ijuk sudah mencakup lebih dari 93 persen.

Gambar 24. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021

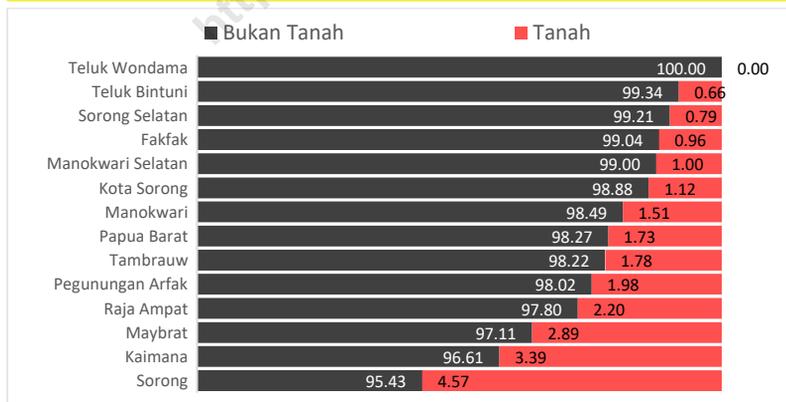
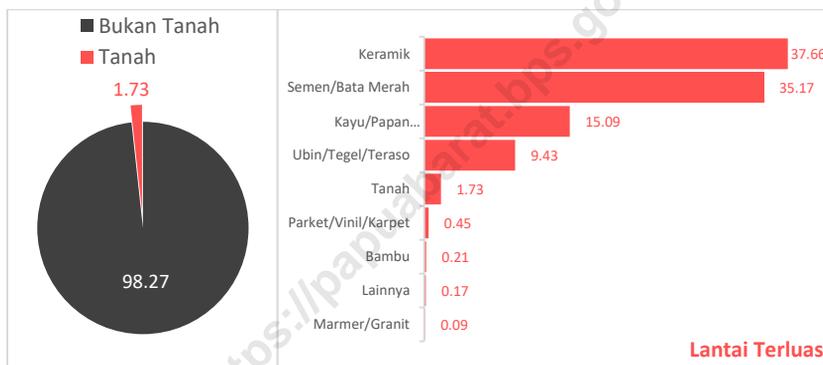


Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Menurut jenis dinding terluas, sebanyak 99,97 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki rumah dengan dinding yang terbuat

bukan dari bambu dan didominasi oleh tembok/plesteran sebanyak 74,18 persen. Di setiap kabupaten/kota, jenis dinding bukan bambu/lainnya rata-rata sudah mencakup lebih dari 93 persen.

Gambar 25. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Menurut jenis lantai terluas, sebanyak 98,27 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki rumah dengan lantai terluas terbuat dari bukan tanah dan didominasi oleh lantai keramik yang mencapai 37,66 persen. Di setiap kabupaten/kota, jenis dinding bukan tanah sudah mencakup lebih dari 95 persen.

Air Minum Layak

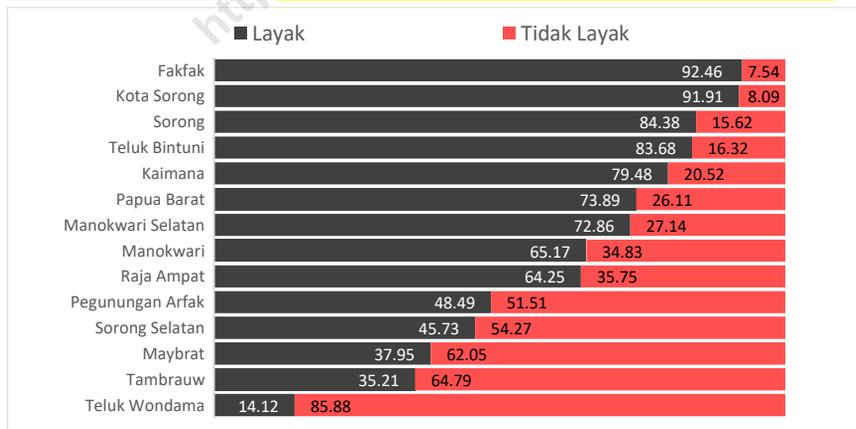
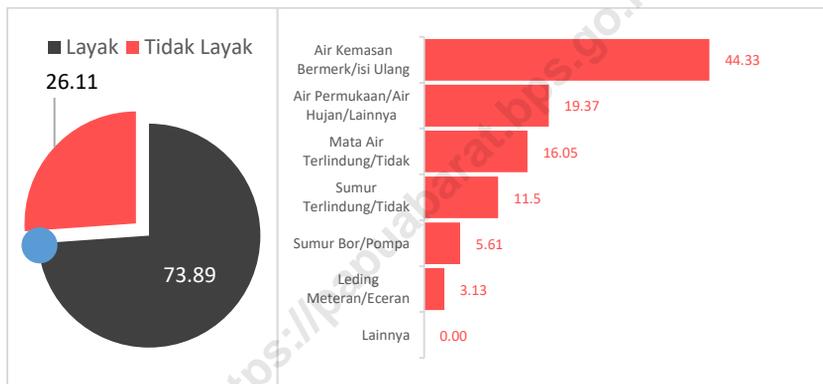


Sumber air minum digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu sumber air minum layak dan tidak layak. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air yang jaraknya ke tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase. Air kemasan dianggap sebagai sumber air minum layak hanya jika rumah tangga yang bersangkutan menggunakannya untuk memasak dan menjaga kebersihan tubuh, dan di Indonesia penggunaan air kemasan tidak dikategorikan sebagai sumber air minum layak karena aspek keberlanjutannya.

Dalam publikasi ini, konsep air minum layak yang ditampilkan hanya berdasarkan kategori air minum utama saja dan sedikit berbeda dengan konsep SDG's dimana air minum layak mencakup air minum utama dan air mandi/cuci.

Gambar 26. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Sejak tahun 2014, penghitungan indikator air minum layak disempurnakan. Sebelumnya, sumber air minum layak hanya berasal dari air leding dan air dari sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke penampungan kotoran lebih dari 10 m dan air hujan, kini kriteria tersebut ditambah dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindungi dengan jarak < 10 m dan air tidak terlindung).

Akses air minum layak di Papua Barat pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari 70 persen, yakni sebesar 73,89 persen. Sumber air minum utama yang digunakan penduduk Papua Barat utamanya berasal dari air kemasan bermerk/air isi ulang dengan porsi sebesar 44,33 persen. Sementara di sisi lain, rumah tangga yang sumber air minum utamanya menggunakan ledeng meteran/ledeng eceran justru hanya sebesar 3,13 persen saja.

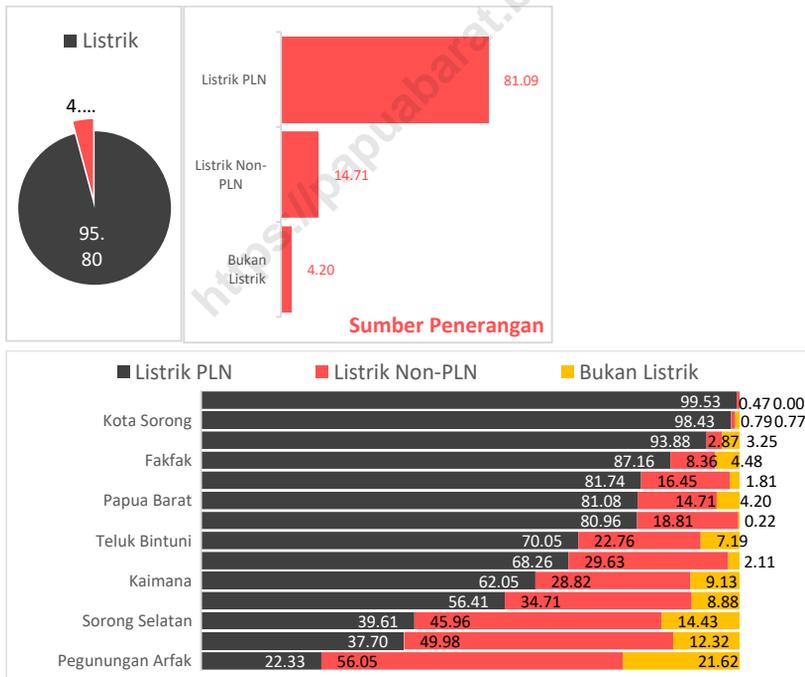
Akses air minum layak antarkabupaten/kota nilainya berbeda-beda. Kabupaten yang sangat minim terhadap akses air minum layak di tahun 2021 adalah Kabupaten Teluk Wondama, yakni dengan porsi hanya sebesar 14,12 persen. Cukup ironis melihat angka ini, mengingat Pulau Papua yang diliputi oleh hutan hujan tropis ternyata masih bergelut dengan permasalahan air minum layak. Sementara itu, akses air minum layak tertinggi berada di Kabupaten Fakfak yang mencapai lebih dari 90 persen, yakni sebesar 92,46 persen.

Penerangan



Sebanyak 95,80 persen rumah tangga di Papua Barat menggunakan listrik PLN maupun listrik non-PLN sebagai sumber penerangan utamanya, dimana proporsi listrik PLN yang digunakan sebesar 81,09 persen, dan listrik non-PLN sebesar 14,71 persen.

Gambar 27. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Penerangan di kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2021 juga terlihat begitu timpang. Hanya sebanyak 2,33 persen rumah tangga saja di Kabupaten Pegunungan Arfak yang memiliki sumber penerangan utama listrik PLN. Lebih dari separuh rumah tangga di Papua Barat (yakni sebanyak 56,05 persen) memiliki sumber penerangan dari bukan listrik, dan bahkan masih terdapat sebanyak 21,62 persen rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sama sekali sebagai sumber penerangannya.

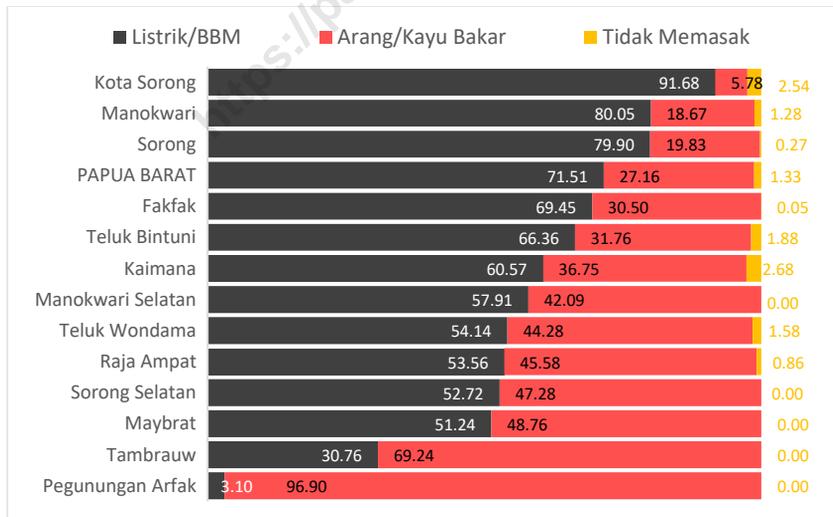
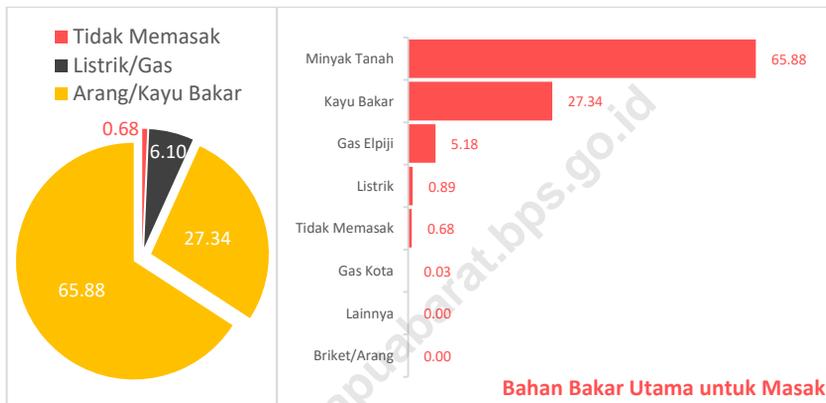
Bahan Bakar Utama Memasak

Lebih dari 60 persen rumah tangga di Papua Barat masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Sementara masih terdapat 27,34 persen rumah tangga yang menggunakan arang/kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak. Adapun rumah tangga yang tidak memasak di rumah sebanyak 0,68 persen. Rumah tangga yang tidak memasak ini umumnya merupakan rumah tangga tunggal yang indekos untuk sekolah atau bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri.

Bahan bakar utama yang digunakan di Papua Barat untuk memasak tahun 2021 adalah minyak tanah yang mencapai porsi sebanyak 65,88 persen, diikuti oleh kayu bakar sebesar 27,34 persen, dan sisanya yakni sebanyak 5,18 persen rumah tangga merupakan pengguna gas elpiji 12 kg dan gas elpiji 5,5 kg. Kabupaten Pegunungan Arfak lagi-lagi menjadi kabupaten yang cukup tertinggal. Pasalnya, sebanyak 97,52 persen penduduknya masih memasak menggunakan arang/kayu bakar

sebagai bahan bakar utamanya.

Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Memasak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

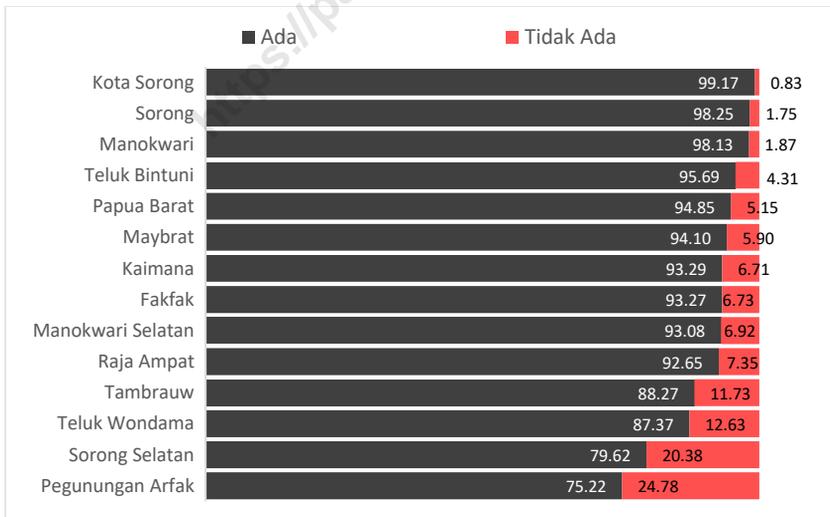
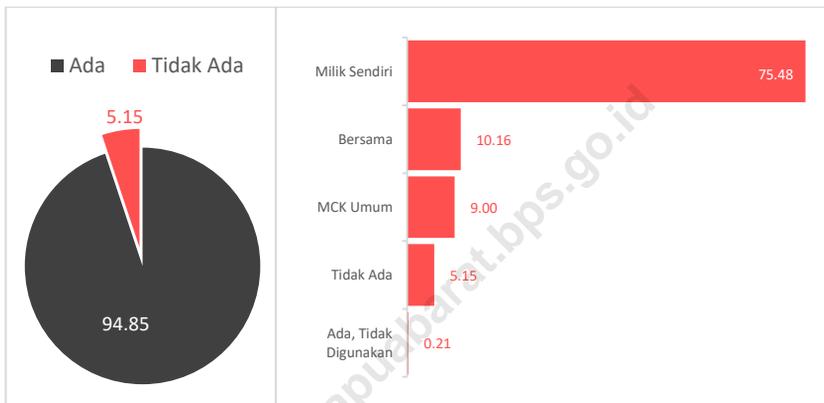


Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia (Bappenas, 2010). Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

Sebanyak 94,85 persen rumah tangga di Papua Barat telah memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB), dimana lebih dari 75 persen rumah tangga memiliki fasilitas BAB yang digunakan sendiri. Sementara di sisi lain, masih terdapat 5,15 persen rumah tangga di Papua Barat yang tidak memiliki fasilitas BAB sama sekali.

Kota Sorong menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Papua Barat yang capaian fasilitas BAB-nya hampir mendekati 100 persen, sementara Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi kabupaten/kota yang lebih dari 20 persen rumahtangganya belum memiliki fasilitas BAB. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat fasilitas BAB merupakan salah satu indikator dalam pencapaian kesejahteraan rakyat.

Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Fasilitas Buang Air Besar dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

BAB 7

SOSIAL LAIN



BAB 7

SOSIAL LAIN



Bab ini menerangkan perlindungan sosial yang dimiliki oleh masing-masing anggota rumah tangga maupun oleh rumah tangga serta kepemilikan aset dan jaminan terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Keterangan yang dicakup pada bab ini meliputi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa dan bantuan pendidikan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan veteran, asuransi kecelakaan kerja, pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan.

Penanggulangan Kemiskinan

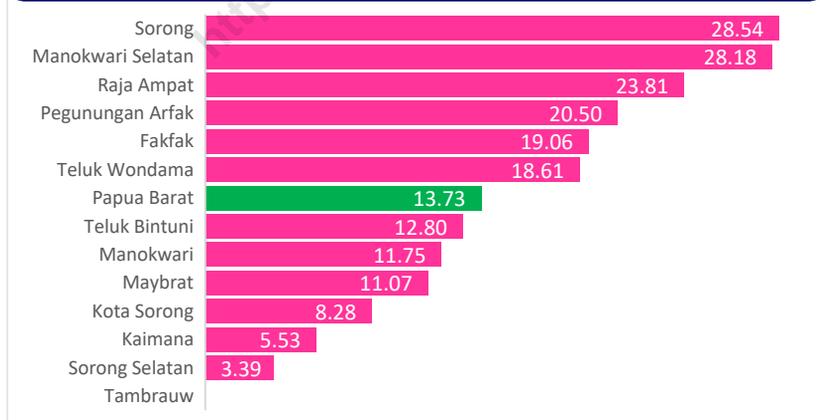


Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama, mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin diantaranya melalui program bantuan pangan non tunai (BPNT), asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS Kesehatan), kartu keluarga sejahtera (KKS) dan program keluarga harapan (PKH).



Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa bantuan pangan non tunai yang selanjutnya singkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (BRI, BTN, dan Mandiri). Program BPNT ini pertama kali diterapkan pada awal tahun 2017 sebagai pengganti Program RASTRA (Beras untuk Keluarga Sejahtera).

Gambar 30. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



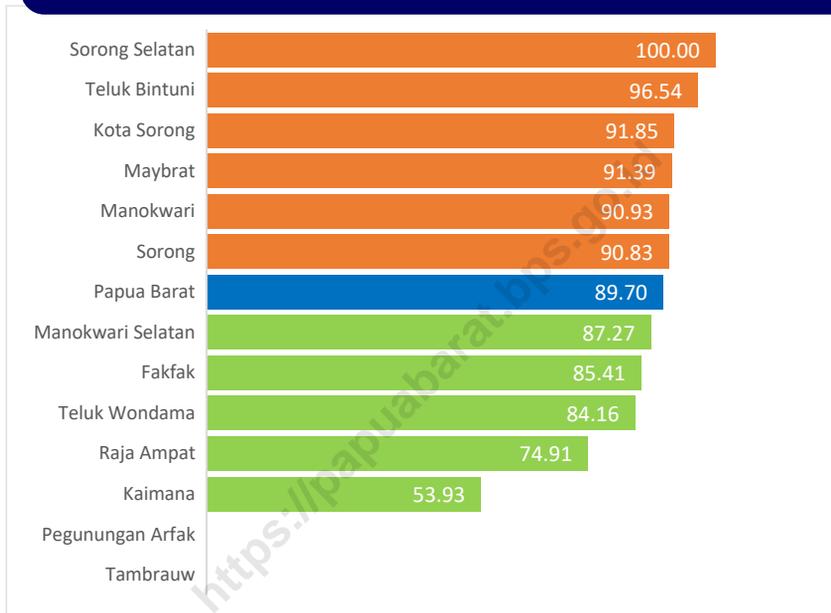
Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Dari gambar 30, terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat sebanyak 13,73 rumah tangga di Papua Barat yang pernah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah, dimana Kabupaten Sorong menjadi kabupaten dengan persentase rumah tangga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak di Papua Barat, yakni sebesar 28,54 persen. Sedangkan di sisi lain, Kabupaten Tambrauw menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Papua Barat yang penduduknya sama sekali tidak menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Keluarga Harapan

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Gambar 31. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



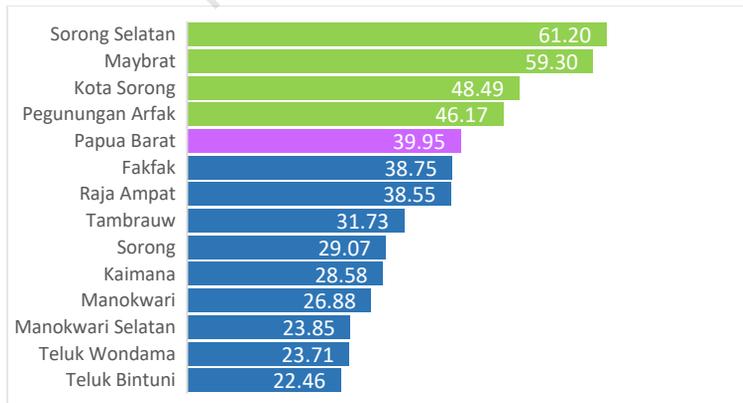
Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Dari gambar 31, terlihat bahwa lebih dari 80 persen rumahtangga di Papua Barat masih tercatat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Sorong Selatan menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Papua Barat yang seluruh penduduknya tercatat sebagai penerima PKH, sedangkan di sisi lain, justru tidak ada satu pun rumah tangga di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tamberauw yang tercatat sebagai penerima PKH.



Program Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah program bantuan sosial yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan. Secara umum, terdapat dua kelompok peserta BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Non-PBI Jaminan Kesehatan. Peserta PBI Jaminan Kesehatan umumnya berasal dari golongan fakir miskin dan tidak mampu. Nantinya, peserta PBI ini akan menerima bantuan pemerintah dalam hal pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan secara teratur setiap bulannya untuk bisa mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dari program jaminan kesehatan nasional.

Gambar 32. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Dari gambar 32 di atas, terlihat bahwa tidak kurang dari 40 persen rumah tangga di Papua Barat tercatat sebagai Peserta Program Bantuan Iuran (PBI) iuran BPJS Kesehatan. Lagi-lagi Kabupaten Sorong Selatan menjadi kabupaten/kota dengan persentase Peserta Program Bantuan Iuran (PBI) iuran BPJS Kesehatan tertinggi di Papua Barat, yakni mencapai 61,20 persen. Sementara di sisi lain, Kabupaten Teluk Bintuni justru menjadi kabupaten/kota dengan persentase Peserta Program Bantuan Iuran (PBI) iuran BPJS Kesehatan terendah di Papua Barat, yang hanya mencapai 22,46 persen rumah tangga saja.

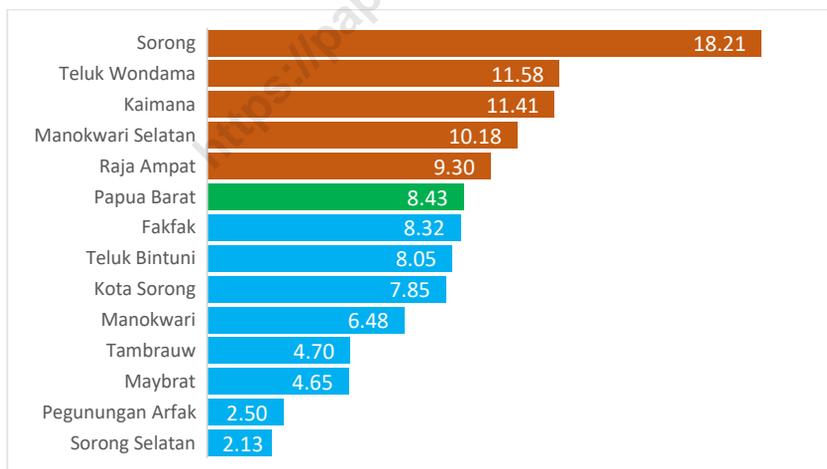
Program Indonesia Pintar



Selain program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program Keluarga Harapan (PKH) dan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang kemudian dikenal sebagai Program Indonesia Pintar (PIP) juga merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. Program PIP digulirkan mengingat angka *drop out* masyarakat miskin, baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan masih sangat tinggi. Karena itu, sasaran penerima program PIP adalah anak sekolah yang berasal dari rumah tangga pada kelompok 25 % pengeluaran terendah. Cakupan tersebut meliputi 17.927.308 orang anak sekolah pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Besaran bantuan yang akan diberikan bagi tingkat SD/MI sebesar Rp 450.000/semester, tingkat SMP/MTs sebesar Rp 750.000/semester dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp 1.000.000/semester.

Tujuan dari program PIP adalah untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin agar dapat melanjutkan sekolah sampai lulus jenjang pendidikan menengah, serta membantu anak-anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07/D/BP/2016 dan Nomor 02/MPK.C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2016.

Gambar 33. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021



Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Dari gambar 33 di atas, terlihat bahwa tidak lebih dari 10 persen rumah tangga di Papua Barat tercatat sebagai peserta Program Indonesia Pintar (PIP), yakni kurang lebih sekitar 8,43 persen. Kabupaten Sorong menjadi kabupaten/kota dengan persentase sebagai peserta Program Indonesia Pintar (PIP) terbanyak di Papua Barat, yakni mencapai 18,21 persen. Sementara di sisi lain, Kabupaten Sorong Selatan justru menjadi kabupaten/kota dengan persentase peserta Program Indonesia Pintar (PIP) terendah di Papua Barat, yakni hanya mencapai 2,13 persen saja.

<https://papuabarat.bps.go.id>

LAMPIRAN



BAGIAN LAMPIRAN



Indikator Kependudukan

Lampiran 1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2010, 2019, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Per Tahun	
	2010	2019	2020	2010-2019	2010-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	66 393	78 686	85 197	1,91	2,38
Kaimana	47 107	60 216	62 256	2,77	2,92
Teluk Wondama	26 425	32 521	41 644	2,33	4,54
Teluk Bintuni	52 619	64 406	87 083	2,27	5,03
Manokwari	138 184	177 346	192 663	2,81	2,97
Sorong Selatan	38 121	46 922	52 649	2,33	3,20
Sorong	70 866	88 927	118 679	2,55	5,15
Raja Ampat	42 076	48 493	64 141	1,59	4,06
Tambrauw	12 961	13 879	28 379	6,65	15,96
Maybrat	33 332	40 899	42 991	2,30	2,57
Manokwari Selatan	19 234	24 220	35 949	2,24	5,93
Pegunungan Arfak	24 772	28 808	38 207	1,23	3,98
Kota Sorong	193 168	254 294	284 410	3,10	3,95
PAPUA BARAT	765 258	959 617	1 134 068	2,55	3,94

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat dalam Angka 2020-2021



Lampiran 2. Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Per km ²
	Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	43 656	41 541	105,09	14.320,00	5,95
Kaimana	32 643	29 613	110,23	16.241,84	3,83
Teluk Wondama	22 036	19 608	112,38	3.959,53	10,54
Teluk Bintuni	50 649	36 434	139,02	20.840,83	4,18
Manokwari	100 006	92 657	107,93	3.186,28	60,47
Sorong Selatan	27 422	25 047	109,48	6.594,31	7,96
Sorong	62 656	56 023	111,84	6.544,23	18,13
Raja Ampat	33 916	30 225	112,21	8.034,44	7,98
Tambrauw	14 780	13 599	108,68	11.529,18	2,46
Maybrat	21 733	21 258	102,23	5.461,69	7,87
Manokwari Selatan	18 589	17 360	107,08	2.812,44	12,78
Pegunungan Arfak	19 339	18 868	102,50	2.773,74	13,77
Kota Sorong	149 703	134 707	111,13	656,64	433,13
PAPUA BARAT	597 128	536 940	111,21	102.955,15	11,02

Catatan:

- Luas wilayah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2018
- Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan

Sumber: BPS, Provinsi Papua Barat dalam Angka 2021



Lampiran 3. Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	67,84	67,95	68,12	68,41	68,47	68,50
Kaimana	63,79	63,99	64,25	64,64	64,81	64,93
Teluk Wondama	58,96	59,26	59,53	59,93	60,10	60,24
Teluk Bintuni	59,48	59,83	60,15	60,60	60,83	60,99
Manokwari	67,84	68,00	68,22	68,56	68,68	68,82
Sorong Selatan	65,49	65,63	65,83	66,15	66,25	66,39
Sorong	65,39	65,52	65,71	66,02	66,10	66,22
Raja Ampat	64,16	64,26	64,42	64,70	64,74	64,83
Tambrauw	59,16	59,29	59,56	59,96	60,13	60,20
Maybrat	64,73	64,80	64,93	65,17	65,19	65,25
Manokwari Selatan	66,82	66,96	67,16	67,48	67,58	67,60
Pegunungan Arfak	66,61	66,72	66,89	67,18	67,24	67,26
Kota Sorong	69,36	69,67	70,00	70,46	70,70	70,93
PAPUA BARAT	65,30	65,32	65,55	65,90	66,02	66,14

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2016-2021





Lampiran 4. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, 2021

Kabupaten/Kota	Dokter Kandungan	Dokter Umum	Bidan	Perawat	Dukun Beranak/ Paraji	Lainnya	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	35,96	2,34	52,58	1,85	7,27	0,00	0,00	100,00
Kaimana	24,08	0,00	57,43	2,97	14,01	1,51	0,00	100,00
Teluk Wondama	9,20	5,45	47,34	2,61	15,46	18,06	1,88	100,00
Teluk Bintuni	44,97	2,01	42,04	1,44	0,91	6,27	2,37	100,00
Manokwari	18,85	0,00	69,78	2,15	2,75	6,46	0,00	100,00
Sorong Selatan	19,17	1,68	36,72	5,17	30,07	6,80	0,39	100,00
Sorong	28,95	0,51	51,19	0,00	8,85	10,50	0,00	100,00
Raja Ampat	5,59	0,00	39,82	3,65	47,16	1,96	1,83	100,00
Tambrauw	14,95	1,07	37,83	3,78	27,23	9,70	5,43	100,00
Maybrat	33,76	1,73	39,61	5,99	10,29	8,61	0,00	100,00
Manokwari Selatan	16,35	0,00	58,87	6,92	8,99	7,21	1,66	100,00
Pegunungan Arfak	5,50	0,96	9,87	2,75	11,74	68,39	0,78	100,00
Kota Sorong	52,73	4,43	36,60	0,00	5,88	0,36	0,00	100,00
PAPUA BARAT	31,50	1,97	47,41	1,89	10,72	5,96	0,54	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Lampiran 5. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	18,47	19,10	18,77
Kaimana	14,41	18,22	16,18
Teluk Wondama	15,34	14,68	15,03
Teluk Bintuni	13,71	14,44	14,04
Manokwari	19,05	22,95	20,94
Sorong Selatan	17,51	16,76	17,15
Sorong	13,96	19,23	16,47
Raja Ampat	18,00	18,35	18,16
Tambrauw	13,68	16,74	15,17
Maybrat	11,46	11,74	11,60
Manokwari Selatan	17,43	18,16	17,78
Pegunungan Arfak	18,21	13,52	15,85
Kota Sorong	30,10	29,71	29,91
PAPUA BARAT	20,08	21,46	20,74

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021





Lampiran 6. Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	13,51	13,76	13,85	14,09	14,37	14,63
Kaimana	11,46	11,59	11,76	11,98	12,13	12,41
Teluk Wondama	10,48	10,81	11,05	11,34	11,48	11,63
Teluk Bintuni	11,62	11,70	11,94	12,17	12,31	12,42
Manokwari	13,51	13,54	13,63	13,64	13,65	13,66
Sorong Selatan	11,93	12,28	12,56	12,88	13,16	13,17
Sorong	12,81	13,05	13,21	13,43	13,71	13,72
Raja Ampat	11,65	11,79	11,80	12,02	12,03	12,06
Tambrau	10,89	11,20	11,32	11,62	11,91	12,18
Maybrat	12,31	12,53	12,67	12,91	13,21	13,47
Manokwari Selatan	12,20	12,27	12,32	12,33	12,35	12,35
Pegunungan Arfak	11,07	11,27	11,33	11,62	11,72	11,72
Kota Sorong	14,00	14,01	14,21	14,22	14,38	14,39
PAPUA BARAT	12,26	12,47	12,53	12,72	12,91	13,13

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat, 2016-2021

Indikator Pendidikan



Lampiran 7. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2016-2021

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	8,22	8,27	8,51	8,64	8,84	8,97
Kaimana	7,83	7,90	8,09	8,28	8,41	8,58
Teluk Wondama	6,57	6,67	6,75	6,87	6,98	7,08
Teluk Bintuni	7,57	7,62	7,77	7,95	8,08	8,22
Manokwari	7,85	7,92	8,04	8,16	8,25	8,34
Sorong Selatan	6,95	7,01	7,15	7,26	7,36	7,49
Sorong	7,57	7,61	7,83	8,02	8,17	8,33
Raja Ampat	7,53	7,57	7,63	7,80	7,91	8,02
Tambrau	4,70	4,81	4,94	5,07	5,24	5,39
Maybrat	6,33	6,43	6,53	6,67	6,85	6,96
Manokwari Selatan	6,32	6,37	6,48	6,57	6,63	6,63
Pegunungan Arfak	4,90	4,91	4,97	5,08	5,12	5,12
Kota Sorong	10,91	10,92	10,93	11,05	11,14	11,19
PAPUA BARAT	7,06	7,15	7,27	7,44	7,60	7,69

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat, 2016-2021





Lampiran 8. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	5-6	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Fakfak	16,18	99,48	98,47	74,42	43,19
Kaimana	19,10	98,65	98,55	66,37	11,60
Teluk Wondama	42,19	97,67	96,48	71,11	12,49
Teluk Bintuni	33,04	96,17	95,92	70,01	18,81
Manokwari	45,97	96,94	96,14	85,72	29,44
Sorong Selatan	47,08	98,94	98,13	79,73	23,74
Sorong	28,57	98,57	97,11	82,54	28,52
Raja Ampat	0,70	95,89	95,14	67,92	11,62
Tambrauw	26,38	95,49	95,01	71,82	25,33
Maybrat	34,06	98,56	97,15	81,57	30,06
Manokwari Selatan	41,72	94,49	93,95	64,26	26,28
Pegunungan Arfak	-	94,79	93,52	61,16	8,36
Kota Sorong	25,08	99,95	97,35	82,53	39,29
PAPUA BARAT	28,74	98,05	96,85	78,01	28,90

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Lampiran 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	109,31	80,04	114,87	109,31
Kaimana	117,11	71,05	79,16	117,11
Teluk Wondama	117,27	95,16	64,07	117,27
Teluk Bintuni	111,33	84,92	89,55	111,33
Manokwari	110,45	93,08	92,68	110,45
Sorong Selatan	125,97	78,52	73,03	125,97
Sorong	109,37	84,86	92,40	109,37
Raja Ampat	114,39	64,78	73,42	114,39
Tambrauw	113,18	85,23	69,19	113,18
Maybrat	110,67	88,98	79,91	110,67
Manokwari Selatan	112,11	84,98	81,14	112,11
Pegunungan Arfak	105,81	61,71	79,97	105,81
Kota Sorong	102,65	89,59	110,42	102,65
PAPUA BARAT	110,18	84,08	93,15	110,18

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018





Lampiran 10. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	97,24	76,34	67,56	29,21
Kaimana	96,63	60,93	57,22	11,60
Teluk Wondama	92,61	66,42	40,21	7,97
Teluk Bintuni	93,04	69,93	56,86	7,60
Manokwari	93,24	76,70	69,50	24,63
Sorong Selatan	93,50	56,30	54,72	17,99
Sorong	96,66	73,38	65,70	23,25
Raja Ampat	94,17	50,94	47,68	9,01
Tambrau	93,29	58,73	48,16	19,96
Maybrat	97,82	86,21	68,09	26,54
Manokwari Selatan	94,31	72,95	49,17	12,26
Pegunungan Arfak	94,67	51,31	49,24	5,66
Kota Sorong	91,74	74,86	71,15	31,41
PAPUA BARAT	94,05	70,52	63,51	22,22

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Lampiran 11. Tabel Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Maret 2020*

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam 000)	P0	P1	P2	Garis Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Fakfak	17,72	22,27	5,87	1,95	578 510
Kaimana	9,52	15,50	2,36	0,59	438 991
Teluk Wondama	10,22	30,91	10,04	4,19	588 838
Teluk Bintuni	19,22	29,39	8,31	3,15	683 667
Manokwari	35,92	20,14	5,87	2,24	651 032
Sorong Selatan	8,71	18,28	3,12	0,82	347 898
Sorong	24,89	27,48	5,97	1,78	379 951
Raja Ampat	8,32	17,01	3,06	0,81	374 488
Tambrau	4,59	32,80	8,99	3,23	393 268
Maybrat	12,80	30,78	8,01	2,64	383 715
Manokwari Selatan	7,09	28,88	8,61	3,55	678 494
Pegunungan Arfak	10,68	33,81	5,53	1,25	670 687
Kota Sorong	38,91	14,99	2,81	0,84	765 183
PAPUA BARAT	208,58	21,37	5,79	2,06	610 888

Catatan: *Data Maret 2021 belum tersed

Sumber: BPS, www.papubarat.bps.go.id





Lampiran 12. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Bambu/ Kayu/ Sirap	Jerami/ Ijuk/ Rumbia	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fakfak	1,22	1,25	96,91	0,63	0,00	0,00	100,00
Kaimana	1,66	1,84	96,09	0,13	0,00	0,29	100,00
Teluk Wondama	0,13	1,28	97,63	0,96	0,00	0,00	100,00
Teluk Bintuni	0,03	3,34	94,27	2,03	0,00	0,33	100,00
Manokwari	1,59	1,84	95,13	1,12	0,33	0,00	100,00
Sorong Selatan	0,12	2,29	88,90	0,14	0,48	6,57	100,00
Sorong	0,00	1,01	98,39	0,61	0,00	0,00	100,00
Raja Ampat	0,00	1,11	96,82	0,33	0,00	1,73	100,00
Tambrauw	0,52	0,00	99,05	0,00	0,00	0,42	100,00
Maybrat	0,76	0,40	98,40	0,00	0,43	0,00	100,00
Manokwari Selatan	0,00	1,08	98,65	0,27	0,00	0,00	100,00
Pegunungan Arfak	0,34	0,43	98,78	0,15	0,00	0,30	100,00
Kota Sorong	0,89	0,73	96,90	1,24	0,19	0,05	100,00
PAPUA BARAT	0,79	1,31	96,40	0,85	0,16	0,43	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



Lampiran 13. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Tembok	Kayu/ Papan/Batang Kayu	Bambu/ Anyaman Bambu	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	83,98	15,02	0,12	0,00	100,00
Kaimana	70,90	29,10	0,00	0,00	100,00
Teluk Wondama	48,16	51,84	0,00	0,00	100,00
Teluk Bintuni	34,83	64,81	0,36	0,00	100,00
Manokwari	79,70	19,96	0,34	0,34	100,00
Sorong Selatan	43,03	49,42	6,30	6,08	100,00
Sorong	73,17	26,83	0,00	0,00	100,00
Raja Ampat	68,55	30,84	0,40	0,28	100,00
Tambrauw	65,50	34,50	0,00	0,00	100,00
Maybrat	87,29	11,36	1,18	0,70	100,00
Manokwari Selatan	73,98	26,02	0,00	0,00	100,00
Pegunungan Arfak	53,90	44,62	1,48	0,00	100,00
Kota Sorong	87,78	12,04	0,18	0,18	100,00
PAPUA BARAT	83,98	25,28	0,54	0,41	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021





Lampiran 14. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Marmer/ Granit	Keramik	Parket/ vinil/ Permadani/ Ubin/ Tegel/ Teraso	Kayu/ Papan Kualitas Tinggi	Semen/ Bata Merah	Bambu	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fakfak	0,42	41,11	8,00	12,97	36,27	0,27	0,96	0,00	100,00
Kaimana	0,00	27,21	17,71	20,10	31,20	0,38	3,39	0,00	100,00
Teluk Wondama	0,00	23,84	1,45	28,24	46,20	0,27	0,00	0,00	100,00
Teluk Bintuni	0,00	22,53	5,02	43,02	28,77	0,00	0,66	0,00	100,00
Manokwari	0,00	35,28	9,27	4,81	48,65	0,48	1,51	0,00	100,00
Sorong Selatan	0,18	16,35	3,86	47,46	27,27	0,00	0,79	4,08	100,00
Sorong	0,00	44,70	3,06	10,09	37,56	0,02	4,57	0,00	100,00
Raja Ampat	0,00	19,57	11,02	16,59	50,58	0,06	2,20	0,00	100,00
Tambrauw	0,00	34,31	4,10	10,05	49,76	0,00	1,78	0,00	100,00
Maybrat	0,98	52,28	2,04	9,29	32,28	0,25	2,89	0,00	100,00
Manokwari Selatan	0,12	32,83	1,92	12,88	50,98	0,27	1,00	0,00	100,00
Pegunungan Arfak	0,00	10,93	4,27	41,73	40,55	0,55	1,98	0,00	100,00
Kota Sorong	0,00	52,16	17,69	7,42	21,52	0,08	1,12	0,00	100,00
PAPUA BARAT	0,09	37,66	9,88	15,09	35,17	0,21	1,73	0,17	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Indikator Perumahan



Lampiran 15. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Air Kemasan Bermerk/ Air Isi Ulang	Leding Meteran/ Eceran	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung/ Tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Fakfak	21,53	21,30	,39	1,57	0,00	16,98	1,64	36,58	100,00
Kaimana	37,74	3,11	1,69	6,40	2,34	19,32	3,74	25,67	100,00
Teluk Wondama	10,79	0,00	1,01	6,13	4,70	19,82	57,28	0,26	100,00
Teluk Bintuni	47,46	0,00	15,89	7,26	1,00	2,14	4,51	21,74	100,00
Manokwari	34,82	0,00	16,57	18,00	5,43	24,47	0,24	0,46	100,00
Sorong Selatan	14,79	0,00	0,42	3,38	6,58	15,34	32,49	26,86	100,00
Sorong	42,73	1,44	3,76	0,88	1,48	7,92	2,90	38,89	100,00
Raja Ampat	7,44	0,05	1,12	45,53	16,42	14,67	4,46	10,33	100,00
Tambrauw	2,13	7,76	1,12	18,34	7,34	19,88	42,54	0,90	100,00
Maybrat	14,97	0,00	2,75	5,28	0,74	31,62	43,74	0,90	100,00
Manokwari Selatan	30,19	0,34	17,37	20,27	6,33	16,56	8,40	0,55	100,00
Pegunungan Arfak	0,30	3,26	0,00	0,68	0,06	89,45	6,25	0,00	100,00
Kota Sorong	89,15	3,20	1,08	2,03	0,02	1,62	0,57	2,33	100,00
PAPUA BARAT	44,33	3,13	5,61	8,60	2,89	16,05	7,45	11,92	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021





Lampiran 16. Persentase Rumah Tanggan Menurut Sumber Penerangan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	87,16	8,36	4,48	100,00
Kaimana	62,05	28,82	9,13	100,00
Teluk Wondama	56,41	34,71	8,88	100,00
Teluk Bintuni	70,05	22,76	7,19	100,00
Manokwari	99,53	0,47	0,00	100,00
Sorong Selatan	39,61	45,96	14,43	100,00
Sorong	81,74	16,45	1,81	100,00
Raja Ampat	37,70	49,98	12,32	100,00
Tambrauw	68,26	29,63	2,11	100,00
Maybrat	80,96	18,81	0,22	100,00
Manokwari Selatan	93,88	2,87	3,25	100,00
Pegunungan Arfak	22,33	56,05	21,62	100,00
Kota Sorong	98,43	0,79	0,77	100,00
PAPUA BARAT	81,08	14,71	4,20	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021

Indikator Perumahan



Lampiran 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untu Memasak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

Kabupaten/Kota	Listrik	Gas Elpiji	Gas Kota	Minyak Tanah	Briket/ Arang	Kayu Bakar	Lainnya	Tidak Masak	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Fakfak	0,35	0,41	0,00	86,01	0,00	0,00	12,70	0,53	100,00
Kaimana	0,26	1,33	0,00	69,37	0,00	0,00	27,29	1,75	100,00
Teluk Wondama	0,56	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00	52,89	0,00	100,00
Teluk Bintuni	0,23	3,57	0,00	60,63	0,00	0,00	34,58	0,99	100,00
Manokwari	1,58	4,17	0,00	72,83	0,00	0,00	20,49	0,94	100,00
Sorong Selatan	0,27	0,40	0,00	27,66	0,00	0,00	71,50	0,17	100,00
Sorong	0,13	4,18	0,27	65,16	0,00	0,00	30,07	0,19	100,00
Raja Ampat	0,14	0,00	0,00	28,01	0,00	0,00	71,49	0,37	100,00
Tambrauw	0,47	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00	77,30	0,31	100,00
Maybrat	0,59	0,34	0,00	69,34	0,00	0,00	29,02	0,70	100,00
Manokwari Selatan	3,51	0,66	0,00	55,56	0,00	0,00	40,09	0,18	100,00
Pegunungan Arfak	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	97,52	0,00	100,00
Kota Sorong	1,36	13,44	0,00	83,41	0,00	0,00	1,00	0,79	100,00
PAPUA BARAT	0,89	5,18	0,03	65,88	0,00	0,00	27,34	0,68	100,00

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2021



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://papuabarat.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jln. Trikora Sowi No. 99 Manokwari Papua Barat 98315
Telp. **(0986) 2210054** Fax.0986 213038
E-mail:papuabarat@bps.go.id
Homepage:<http://papuabarat.bps.go.id>